

**IDEOLOGI KHILAFAH FELIX SIAUW DI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF KUASA-PENGETAHUAN MICHEL FOUCAULT**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

Zulfikar Emir Haq

NIM : E91217057

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfikar Emir Haq

NIM : E91217057

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Ideologi Khilafah Felix Siauw di Media Sosial Perspektif Kuasa-Pengetahuan Michel Foucault”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi kecuali pada beberapa bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 14 Juni 2022



Zulfikar Emir Haq
E91217057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Khilafahisme Felix Siauw Di Media Sosial Perspektif Kekuasaan-Pengetahuan Michel Foucault” yang ditulis oleh Zulfikar Emir Haq telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang skripsi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 23 Desember 2021
Pembimbing



Dr. Muhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I
NIP. 198101152009011011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Ideologi Khilafah Felix Siauw Di Media Sosial Perspektif Kuasa-Pengetahuan Michel Foucault" oleh Zulfikar Emir Haq ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 23 Juni 2022.

Tim Penguji

1. Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil. I : 

2. Suhermanto, M.Hum : 

3. Isa Anshori, M.Ag : 

4. Fikri Mahzumi, S.Hum., M.Fil.I : 

Surabaya, 19 Juli 2022

Dekan



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D

NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfikar Emir Haq
NIM : E91217057
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat/Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : zulfikaremirhaq@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Ideologi Khilafah Felix Siauw Di Media Sosial Perspektif Kuasa-Pengetahuan Michel Foucault

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juli 2022

Penulis

(Zulfikar Emir Haq)

ABSTRAK

Kemajuan teknologi membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan manusia, perubahan tersebut mengakibatkan transformasi metode dakwah yang menjadikan media sosial sebagai alat dakwah masa kini. Tidak melihat latarbelakang sosial, politik, budaya, dan ideologi seseorang dalam penggunaan media sosial serta tidak adanya kontrol di dalamnya merupakan sisi lain dari bahaya media sosial. Hal ini dimanfaatkan oleh HTI yang kini menjadi organisasi terlarang di Indonesia, HTI lebih masif dalam mempropagandakan gagasan dan wawasan *khilafah* ala HTI. Terlebih mereka memiliki kader bernama Felix Siauw yang sangat digandrungi oleh kaum muda, Felix Siauw menggunakan media sosialnya sebagai media dakwahnya, latarbelakangnya sebagai marketing digunakan secara maksimal untuk mempromosikan gagasan *khilafah*. Banyaknya orang yang tidak paham bagaimana sistem *khilafah* beroperasi serta proses transisi ideologi dalam bernegara menjadi masalah baru. Teori kuasa-pengetahuan Michel Foucault relevan untuk membedah bagaimana proses ideologisasi *khilafah* yang dilakukan oleh Felix Siauw. Kuasa-pengetahuan memiliki relasi yang berkesinambungan, terutama bagi sebuah ideologi yang termarginalkan, sebab penggunaan pengetahuan bisa memproduksi sebuah kuasa, sedangkan kuasa dapat mereduksi, membuat, dan merawat pengetahuan yang bertujuan untuk terus melanggengkan kuasa sesuai kepentingannya.

Kata kunci: media sosial, Felix Siauw, kuasa-pengetahuan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	20
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian.....	21
E. Kajian Terdahulu	21
F. Metodologi	26
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II ANCAMAN IDEOLOGIS EKS-HTI DAN MICHEL FOUCAULT	
A. Profil, Tujuan, dan Metode Hizbut Tahrir	29
B. Perbedaan Khilafah dan Khalifah	32
C. Perjalanan Hizbut Tahrir Indonesia	35
D. Biografi dan Relasi Kuasa-Pengetahuan Michel Foucault	43
BAB III BIOGRAFI FELIX SIAUW DAN “KHILAFAHISME” DI MEDIA SOSIAL	
A. Biografi Felix Siauw	50
B. Media Sosial Sebagai Media Dakwah	54
C. Mengenal Generasi-Z.....	57
D. Aktivisme Felix Siauw di Media Sosial.....	64
BAB IV MEMBONGKAR “KHILAFAHISME” FELIX DI MEDIA SOSIAL MENURUT MICHEL FOUCAULT	
A. Membongkar Misi <i>Khilafahisme</i> Felix Siauw	74
B. Kritik Akademisi Muslim Terhadap <i>Khilafah</i> Eks-HTI	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca HTI dibubarkan pada tanggal 19 Juli 2017 oleh pemerintah Republik Indonesia sepertinya tidak membuat para anggota dan simpatisan HTI tinggal diam. Perlu diingat bahwa HTI dibubarkan karena secara ideologis dan gerakan sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, konsep ideologi mereka disebut *khilafah*, dari berbagai bukti yang ada akhirnya pemerintah melakukan pencabutan izin ormas tersebut, praktis ormas tersebut tidak diperkenankan untuk mengadakan kegiatan apapun dan tidak diperkenankan menunjukkan identitas karena telah bersifat ilegal. Berharap HTI berhenti berkembang justru malah sebaliknya, para anggota dan simpatisan HTI justru makin masif dengan menggunakan media sosial sebagai alat kampanye ideologi.

Masyarakat sering mendengar kata *khilafah* sebagai ideologi dan sistem pemerintahan, perlu diketahui bahwa *khilafah* mulai digelorkan secara masif saat HT (Hizbut Tahrir) mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang melandaskan gerakan serta ajarannya pada nilai-nilai Islam. Gerakan ini memiliki cita-cita besar yaitu mengembalikan lagi sistem pemerintahan *khilafah*. Hizbut Tahrir lahir di al-Quds Palestina pada tahun 1953 pendirinya adalah Taqiyuddin al-Nabhani, ia adalah seorang aktivis pendiri Hizbut Tahrir dimana tujuan awalnya sebagai gerakan untuk membebaskan Palestina dari penjajah, dan kemudian berubah menjadi gerakan untuk membebaskan orang Islam dari sekat nasionalisme. HT beranggapan bahwa untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam bermasyarakat

hanya dengan menggunakan konsep negara Islam dalam hal ini yang dimaksud adalah *Daulah Islamiyah* atau *Daulah Khilafah* yang kelak dipimpin oleh seorang khalifah yang dipilih dan di baiat oleh umat, khalifah tersebut harus dipatuhi dan di dengar oleh seluruh umat karena pemerintahan yang akan dijalankan berdasarkan kepada kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul. Dua aspek yang menjadikan alasan HT berdiri yaitu aspek historis dan normatif, secara historis gerakan ini merupakan sebuah bentuk usaha untuk membangkitkan umat muslim dari keterpurukan yang panjang dimana penjajahan oleh negara barat telah dimulai di abad 19. Sedangkan secara normatif gerakan ini menjadi respon atas seruan Allah SWT yang ada dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran [3] ayat 104:

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segelongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

HT dinilai oleh banyak kelompok sebagai gerakan fundamental yang memaksakan kehendak cita-citanya dengan cara apapun. Kata fundamental menurut Jan Hjarpe merupakan sebuah keyakinan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber otoritatif yang mengandung norma agama, politik, sosial, dan kebudayaan untuk menciptakan tatanan hidup manusia yang baru. Sedangkan menurut Leonard Binder fundamentalisme adalah sebuah gerakan keagamaan yang menjunjung tinggi romantisme periode Islam awal. HT beranggapan bahwa *khilafah* sebagai ajaran agama Islam yang harus ditegakkan secara *kaffah* yang tidak bisa ditawar, HT memandang bahwa tidak adanya *khilafah* menjadikan umat Islam mengalami kemerosotan dikarenakan memiliki tiga masalah besar. *Pertama*, umat Islam telah kehilangan pemimpin yang bisa menyatukan umat,

karena terpecah-pecah di beberapa negara bangsa; *kedua*, tidak adanya *khilafah* menjadikan dilalaikannya penegakkan hukum dan ajaran Islam secara *kaffah* karena tidak ada institusi yang legal sebagai eksekutornya; *ketiga*, tidak adanya *khilafah* menjadikan umat Islam tidak kuat menjalankan dakwah ke seluruh penjuru dunia.¹

Atas dasar itulah HT berpandangan bahwa segala sistem pemerintahan yang ada di dunia tidak bisa diterima kecuali sistem *khilafah*, termasuk demokrasi. Bahkan pemimpin tertingginya menulis buku yang secara khusus menggugat demokrasi, secara tegas dan terang-terangan buku itu diberi judul *al-Dimuqrāthiyah Nizam Kufri Yahrumu Akhdzuhā aw Tathbīquha aw al-Da'wah Ilaihā* (Demokrasi adalah undang-undang kufur, haram mengambil, menerapkannya, dan menyebarkannya)² dan dalam buku itu mengulas secara tuntas alasan dan dasar-dasar pada judul buku tersebut, beberapa kesimpulan dalam buku tersebut yaitu:

- a. Demokrasi bertentangan dengan Islam secara sumber hukumnya, ideologi, asas, dan pemikirannya.
- b. Demokrasi adalah sistem yang dibuat oleh manusia untuk melepaskan diri dari kedzaliman dan hukum penguasa atas nama agama, sehingga dinilai tidak ada hubungannya dengan Islam.
- c. Demokrasi lahir dari pemisahan agama dan kehidupan (sekuler), yang dianggap sebagai ideologi penopang kapitalis.

¹ Mohamad Rafiuddin, "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir *vis a vis* NU)", *Islamuna*, Vol. 2 No. 1, (2015), 34.

² *Ibid.*, 35.

Hizbut Tahrir adalah partai politik internasional yang berideogikan Islam, ini artinya HT menjadikan akidah Islam sebagai asas dasar partai sehingga dalam menetapkan ide-ide, hukum dan pemecahan persoalan kehidupan harus berlandaskan akidah Islam. Sebagai organisasi politik, HT tidak bisa lepas dari aktivitas politik, disadari atau tidak HT telah memberikan sinyal bahwa umat Islam harus *melek* politik, bahkan HT menilai bahwa akidah Islam merupakan pemikiran yang bersifat politik dan asas politik bagi umat Islam.

Kemunculan HT sebagai pengusung tegaknya *khilafah* menimbulkan pro-kontra dalam internal umat Islam sendiri karena masih banyak juga dari kelompok-kelompok Islam menilai bahwa penegakkan *khilafah* juga harus melihat realitas yang terjadi saat ini. Ada yang menarik dari berdirinya HT sebagai partai politik yakni HT memandang bahwa politik hanya digunakan untuk memelihara dan mengatur urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan syariat Islam, itu menyebabkan pada proses faktualnya HT lebih banyak menjadi pihak yang melakukan konfrontasi dengan pemerintahan 'sekuler' serta tidak terlibat dalam politik praktis. HT lebih banyak melakukan kampanye terkait gagasan Islam di khalayak umum, HT juga bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk membimbing umat dan mengajak umat untuk menjadikan Islam pijakan dalam segala urusan kehidupan, mengajak mendirikan kembali tegaknya *khilafah* dan kembali menegakkan hukum-hukum Islam di penjuru dunia.³ Isu *khilafah* tidak hanya diusung di kalangan negara-negara di daerah timur tetapi juga di daerah barat, gerakan HT merupakan ancaman nyata bagi negara-negara Muslim bahkan

³ Mohamad Rafiuddin, "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir *via a vis* NU)", *Islamuna*, Vol. 2 No. 1, (2015), 32.

negara-negara barat, tercatat dari awal berdirinya hingga tahun 2006 HT diperkirakan telah berkembang di lebih dari 25 negara diantaranya seluruh negara di Timur Tengah termasuk di Afrika (Mesir, Aljazair, Libya, dan Sudan), termasuk di negara-negara Eropa antara lain Turki, Inggris, Jerman, Austria, Belanda dan sekitarnya, termasuk juga Amerika Serikat, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia. Hal ini memperkuat bukti bahwa HT tidak hanya menyerang sistem pemerintahan non *khilafah* tetapi memiliki antipati terhadap nilai nasionalisme⁴.

Alih-alih mau menyelamatkan umat Islam dari kemerosotan justru gerakan HT makin memperkeruh keadaan, hal ini dikarenakan gerakan ini berguguran ditengah jalan bahkan HT pun melakukan afiliasi dengan penjajah.⁵ Konsep pemerintahan *khilafah* ala HT dalam melakukan pengangkatan seorang *khalifah* dinilai memiliki problematika yang sangat fundamental yakni sebelum tegaknya *khilafah* cara yang bisa dilakukan oleh HT adalah melakukan kudeta dan *people power*.

Terlepas dari proses merebut kekuasaan, proses baiat kepada *khalifah* yang dikonsepsikan oleh HT tidak bisa diyakini seutuhnya karena baiat yang dikonsepsikan oleh HT rentan terhadap kebohongan. Hal itu terjadi karena proses baiat yang dimaksud meminta sebuah kerelaan serta kebebasan memilih agar *khalifah* benar-benar dipercaya dan dikehendaki oleh umat Islam, sedangkan setiap individu bisa dan memiliki potensi untuk melakukan baiat palsu atau rekayasa dan bahkan melakukan baiat karena dipaksa oleh kelompok tertentu,

⁴ Ainur Rafiq al-Amin, "Kritik Pemikiran Hizbut Tahrir Yang Autokratik", *Teosofi*, Vol. 7 No. 2, (2017), 470.

⁵ *Ibid.*, 33.

maka keabsahan kepemimpinan yang terjadi hanya bisa dilakukan dengan kekuatan dan intimidasi, hal ini bisa menjadikan lemahnya legitimasi kekuasaan yang akan menimbulkan konflik politik yang berulang-ulang.⁶

Selanjutnya, dalam proses kekuasaan pemerintahan *khalifah* memiliki otoritas yang mutlak terhadap segala urusan negara bahkan negara melekat pada diri sang *khalifah* karena segala aturan negara hanya *khalifah* yang bisa merubah, mengganti, dan menetapkannya. *Trias politica* yang selama ini kita ketahui tidak akan kita temui saat pemerintahan *khilafah* berdiri, dalam filsafat politik otoritas yang mutlak sebesar itu perlu limitasi kekuasaan karena jika tidak ada limitasi kekuasaan akan muncul totaliter dan otoriter yang mengakibatkan hilangnya *civiel society* yang merupakan cita-cita dalam bernegara. Jika limitasi kekuasaan tidak ada maka akan membuka peluang koruptif, nepotisme, dan sebagainya karena kodrat manusia tetap memiliki kesalahan dalam mengambil kebijakan.

Jika melihat konsep pemerintahannya, *khilafah* hampir sama dengan sistem pemerintahan Autokrasi. Dimana sistem pemerintahannya hanya dikuasai satu orang bahkan fungsi Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif hanya ada ditangan satu orang pemimpin itu, hampir sama dengan diktator memang dimana segala kritik akan dibungkam oleh pasukan bersenjata.⁷ Lebih parahnya lagi jika khalifah melakukan perbuatan dzalim dan maksiat, rakyat tidak bisa melakukan pemberontakan, tentunya hal tersebut akan melanggengkan kekuasaan. Senada dengan gerakan Salafi yang tidak menginginkan pengembosan kekuasaan, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW bahwa penguasa adalah bayangan (naungan) Allah

⁶ Ainur Rafiq al-Amin, "Kritik Pemikiran Hizbut Tahrir Yang Autokratik", *Teosofi*, Vol. 7 No. 2, (2017), 477.

⁷ *Ibid.*, 471.

di muka bumi, maka barangsiapa memuliakannya maka Allah akan memuliakannya. Dan barangsiapa yang merendahkannya maka Allah akan merendahkannya, sebagai bahan refleksi, maka sistem pemerintahan yang dibahas sebelumnya menjadikan pemimpin hanya sekedar ditaati, tidak lebih dari itu. Sedangkan sebagai pemimpin haruslah menjadi suri tauladan bagi rakyat yang dipimpinnya.

HT mulai masuk Indonesia pada tahun 1982 melalui M. Mustofa dan Abdurrahman al-Bagdadi, Mustofa adalah putra Abdullah bin Nuh seorang ulama sekaligus dosen UI fakultas sastra dan menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Ghazali di Bogor, Mustofa juga merupakan alumnus perguruan tinggi di Yordania dimana semasa menjadi mahasiswa dia berkenalan dan bergabung dengan HT di Yordania. Sedangkan Abdurrahman merupakan keturunan Palestina yang bermigrasi ke Australia pada tahun 1960-an.⁸ Abdullah bin Nuh yang menjadi seorang guru dan pendakwah merasa kecewa dengan Organisasi Islam di Indonesia yang terjadi pada 1970-an, dalam kunjungannya ke Sidney Abdullah bin Nuh bertemu dengan Abdurrahman yang kemudian meminta Abdurrahman untuk datang ke Indonesia untuk mengajarkan pemikiran An-Nabhani di pondok pesantren miliknya, dimana dalam perkembangan selanjutnya pondok pesantren Al-Ghazali Bogor menjadi pusat pembelajaran gagasan HT. Keduanya Abdurrahman dan Mustofa menjadi aktivis HT yang pertama kali memperkenalkan HT di Indonesia menggunakan dua metode yakni *pertama*, *halaqoh* (Lingkaran Studi) dan *kedua*, *daurah* (program pelatihan) dengan

⁸ Ilyya Muhsin, "Gerakan Penegakan Syariah: Studi Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia di DIY", *Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, (2012), 47.

memanfaatkan aktivis kampus yaitu Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) mampu menyebarluaskan gagasan-gagasan An-Nabhani hingga ke kampus-kampus ternama di Indonesia termasuk IPB, UI, dan UGM.⁹

Tujuan utama gerakan HTI sudah jelas yaitu penegakan syariah Islam, sebagai bagian dari garis politiknya HTI menolak terhadap praktik demokrasi dan konsep kenegaraan yang ada di Indonesia. Dalam soal kenegaraan hti pastinya menganut *Khilafah Islamiyah* yang dianggap sebagai jihad, dengan modal perjuangan yang konsisten hti hendak mengubah bentuk negara NKRI menjadi khilafah. Ini merupakan bentuk Islamisasi negara pada level nasional yang kemudian diangkat ke level global dan kelak akan membentuk imperium *Khilafah Islamiyah* lintas bangsa. Ini merupakan gerakan perlawanan dari sebuah kondisi dimana umat Islam terpecahbelah oleh bentuk negara-bangsa (*nation-state*), sedangkan HTI memiliki prinsip bahwa dalam Islam hanya ada umat yakni kesatuan global dibawah payung *Khilafah Islamiyah*.¹⁰

Doug McAdam dalam teorinya menjelaskan tiga kerangka strategi dalam membentuk gerakan sosial, yakni memanfaatkan peluang politik (*political opportunities*), memobilisasi struktur (*mobilizing structures*), dan penyusunan proses gerakan (*framing process*). Strategi tersebut relevan untuk membaca gerakan hti dalam usaha menegakkan sistem negara *khilafah*¹¹, beberapa diantaranya adalah:

⁹ Ahmad Khotim Muzakka, "Propaganda Khilafah HTI di Indonesia", *Penelitian*, Vol. 14 No. 2, (2017), 169.

¹⁰ Syaiful Arif, "Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia", *Aspirasi*, Vol. 7 No. 1, (2016), 96.

¹¹ Ilyya Muhsin, "Gerakan Penegakan Syariah: Studi Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia di DIY", *Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, (2012), 51.

- a. Pemanfaatan peluang politik HTI terjadi ketika rezim orde baru berakhir yang diteruskan dengan munculnya era reformasi dengan membawa salah satu konsep kebebasan (meliputi berpendapat, berideologi, berorganisasi, dll), disini HTI memiliki peluang emas menjadi organisasi legal dan mungkin satu-satunya di dunia sehingga mereka bisa lebih leluasa melakukan gerakan.
- b. Mobilisasi struktur ini lebih dominan ditujukan kepada mahasiswa yang dianggap memiliki fungsi sosial serta semangat yang tinggi dalam melakukan promosi dan kreatifitas menyebarkan gagasan HTI.
- c. Penyusunan proses gerakan, hal ini cukup menarik dikarenakan HTI pada dasarnya tidak suka dan menganggap haram segala produk-produk dari barat dan yang bertentangan dengan Islam. Mayoritas gerakan tahap ini melakukan pergolakan pemikiran dan politik melalui media cetak dan elektronik sebagai sarana utama dengan cara membongkar serta menentang segala konspirasi negara-negara kafir untuk membebaskan umat dari penjajahan. Pada akhirnya segala krisis yang terjadi itu HTI menawarkan solusi dengan menerapkan syariat Islam secara total yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat.

Tidak berhenti disini, pimpinan HTI Ismail Yusanto menyatakan “Islam Alternatif” yang berangkat dari “Totalisme Syariah”, dimana konsep ini diyakini mampu menjadi solusi dari segala masalah ekonomi, sosial-politik modern, serta beberapa krisis yang lain. Mereka menganggap bahwa sistem barat yang sekarang sedang dijalankan merupakan sistem “Jahiliyah Modern”, disebut jahiliyah karena barat melakukan modernitas yang mengakibatkan peran Islam dalam ruang publik tidak lagi menjadi sesuatu yang primer. Oleh karena itu HTI merasa *khilafah*

menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat Indonesia agar mampu keluar dari berbagai krisis atau permasalahan dalam segala aspek kehidupan.

Gerakan HTI dalam mewujudkan cita-citanya bersifat revolusioner yang sangat ingin mengganti tatanan sosial lama dengan yang baru secara komprehensif, tujuannya sangat jelas yaitu transformasi secara total untuk menghancurkan sistem pemerintahan kufur dan rusak yang mereka anggap hanya memberikan kesengsaraan bagi umat. Dilain sisi gerakan HTI merupakan penyelamatan sosial terhadap umat dari sistem yang rusak dan kufur dengan jalan melakukan kritik sosial (ketimpangan, ketidakadilan, kelaparan, korupsi, dan segala bentuk kesewenang-wenangan) yang akhirnya justru memberikan krisis yang lebih parah lagi bagi kondisi sosial masyarakat, tapi hal inilah yang diinginkan oleh mereka yakni sebuah tatanan kehidupan yang *chaos* dan HTI akan terus berkembang dengan subur dalam situasi sosial yang demikian.¹²

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, hti menjadi organisasi legal di Indonesia bahkan bisa dikatakan ini adalah satu-satunya struktur perjuangan HT internasional bisa diakui oleh sebuah negara. Hal ini terjadi tahun 2006 pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kala itu HTI terdaftar di Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri dengan nomer 44/D.III.2/VI/2006 sebagai organisasi sosial keagamaan.¹³ Ini sangat berbanding terbalik dengan wacana publik di awal kemunculannya yakni menjadi partai politik. Uforia HTI tidak berlangsung lama karena di tahun 2017 isu HTI

¹² Illya Muhsin, "Gerakan Penegakan Syariah: Studi Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia di DIY", *Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, (2012), 59.

¹³ Abdul Qohhar dan Kiki Muhamad Hakiki, "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran", *Kalam*, Vol. 11 No. 2, (2017), 373.

dibubarkan menjadi sorotan seluruh media sosial dan media elektronik, hal ini terjadi karena negara berkewajiban melindungi seluruh masyarakat dengan bangunan politik NKRI yang berarti segala ancaman, penolakan, dan penistaan terhadap Pancasila harus dilawan. Meskipun ancaman itu masih pada tahap wacana tetapi itu merupakan distabilitas politik nasional bagi negara yang berujung pada perpecahan dikalangan anak bangsa. Dalam hal ini HTI sebagai penista Pancasila telah diyakini sebagai organisasi yang memberikan ancaman ideologi, politik, demokrasi, serta keamanan. *Pertama*, HTI meyakini pancasila adalah ideologi kufur karena memuat pluralisme (keberagaman), *kedua*, HTI memberikan ancaman politik nasional karena ingin mengganti NKRI dengan *Khilafah Islamiyah* dan ini merupakan anakronisme yaitu pemaksaan untuk menggunakan politik tunggal masa lalu di masyarakat kontemporer yang majemuk. *Ketiga*, tidak sedikit anggota HTI terlibat dan bergabung dengan jaringan terorisme salah satunya *Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS)*.¹⁴

Kini dari penjelasan diatas pemerintah Indonesia memiliki tiga pilihan untuk menyikapi keberadaan HTI, (1) mengakui keberadaan HTI, (2) tidak mengakui tapi tidak melarang, (3) melarang. Alhasil pemerintah Indonesia memilih langkah ketiga yakni melarang dan membubarkan organisasi HTI, ini merupakan pilihan paling ekstrem dan penuh resiko karena gerakan dan keyakinan mereka tidak semudah itu dibubarkan juga justru akan lebih berbahaya karena bergerak secara diam-diam, langkah Indonesia ini mengikuti jejak Jerman, Rusia, dan Belanda dalam menyikapi HT. Dimodali dengan Perpu No. 2 tentang

¹⁴ Syaiful Arif, "Pandangan dan Perjuangan Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia", *Aspirasi*, Vol. 7 No. 1, (2016), 102.

Organisasi Kemasyarakatan,¹⁵ pemerintah secara resmi mencabut badan hukum HTI pada tahun 2017. Pilihan ini bukan berarti simpatisan HTI telah bubar barisan, ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah karena harus memastikan bahwa ideologi ini telah hancur hingga akar rumput, hal ini perlu diperhatikan dari beberapa pengalaman negara terlebih dahulu dimana simpatisan HTI masih masif dan memegang teguh visinya. Beberapa analisis politik mengungkapkan bahwa simpatisan HTI masih memiliki beberapa pilihan untuk terus melanjutkan cita-citanya untuk memperjuangkan *Khilafah Islamiyah* yang selama ini digugu kebenarannya, (1) membentuk ormas baru, karena meski HTI telah ilegal tetapi para simpatisan dan kader masih memiliki hak berkumpul dan berserikat dengan payung organisasi lain, (2) memanfaatkan dan mengisi ruang kosong untuk menyalurkan perlawanan masyarakat atau bahkan etnis yang tertindas, (3) bergabung dengan partai politik yang memiliki ideologi yang mereka anggap mirip dengan ideologi Islam (misal PKS, PAN, PPP, dan PBB).¹⁶

Poin ketiga ini akan dipilih jika mereka gagal dan susah untuk membentuk organisasi baru untuk terus melanjutkan perjuangannya. Penggabungan dengan partai politik bisa saja terjadi mengingat partai politik lebih bersifat pragmatis dan tidak menganggap penting identitas dan agama suatu kelompok. Selama mampu memberikan keuntungan elektoral maka partai politik akan dengan senang hati untuk memberikan ruang serta posisi strategis dalam partai. Penggabungan ini dirasa lebih aman dan realistis karena hasrat mendirikan negara Islam dalam terekam jelas dalam visi misi dan dapat diperjuangkan secara konstitusional.

¹⁵ Abdul Qohhar dan Kiki Muhamad Hakiki, "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran", *Kalam*, Vol. 11 No. 2, (2017), 388.

¹⁶ *Ibid.*, 390.

Rekam jejak sebelumnya telah terjadi saat Pilkada DKI Jakarta, HTI menyalurkan kekuatan politik diluar pemerintahan (oposisi) dimana para simpatisan dan kader HTI banyak yang terlibat dalam demontsrasi menolak terhadap pecalonan Ahok di Pilgub DKI tahun 2017 dan bertujuan menyeret Ahok dipidanakan.¹⁷ Hal politik yang lain adalah Pemilu dan Pilpres 2019 dimana HTI mendorong adanya “koalisi syariah” hingga secara tidak langsung mendukung calon tertentu serta menyerukan untuk memilih para pemimpin yang seiman dan mampu menyatukan kekuatan politik Islam sebagai upaya jangka panjang untuk terus memperjuangkan *Khilafah Islamiyah* dikemudian hari.

Sedangkan dalam ruang lain para simpatisan dan kader HTI melakukan promosi gagasan *khilafah* mereka melalui media sosial. Sebenarnya ini bukanlah pertama kali bagi simpatisan dan kader HTI untuk bernarasi di ruang media dalam jaringan, karena sebelumnya mereka sangatlah aktif dalam membuat opini publik guna menggaungkan *Khilafah Islamiyah* melalui website resmi mereka bahkan mereka mampu mencetak tabloid atau majalah untuk disebar kepada masyarakat, dan hingga pasca dibubarkan mereka justru semakin aktif di media sosial guna terus mendakwahkan gagasan *khilafah* dengan cara yang lebih halus agar masyarakat bisa lebih tertarik dengan narasi yang mereka tulis.

Media sosial merupakan salah satu alat yang realistis di masa kontemporer ini, pengguna media sosial memiliki beberapa motivasi untuk menjadikan sebagai media sosial penyebar pesan antara lain:

¹⁷ “Pilkada DKI Jakarta Berujung Pemberangusan HTI” dalam <https://tirto.id/Diakses> 29 Juni 2022.

- a. Menjadikan media untuk mencegah dan menghentikan berita hoax atau informasi yang belum tentu kebenarannya.
- b. Ingin menggunakan media sosial sebagai alat untuk mengkritisi pemerintah.
- c. Ingin menjadikan media sosial sebagai media dakwah.¹⁸

Perlu diakui pula bahwa dalam satu dekade terakhir media sosial memiliki peran yang sangat signifikan terhadap setiap lapisan masyarakat, hampir mustahil setiap individu tidak memiliki atau tidak mengakses media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, penggunaanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi tanpa terbatas ruang dan waktu¹⁹. Bahkan media sosial menjadi budaya bagi anak muda untuk digunakan sebagai alat komunikasi, berinteraksi, *life style*, promosi dagangan, bahkan media sosial juga bisa menjadi media dakwah termasuk juga tentang dunia Islam. Dalam proses perkembangannya muncul diskursus-diskursus keagamaan yang menjadi sebagai ragam variasi pemikiran dunia Islam²⁰ di ruang media sosial seperti *Youtube dan Instagram* melalui akun atau channel dari beberapa figur publik atau para dai. Salah satu figur publik yang sangat terkenal sekarang yaitu Felix Siauw yang sering disapa oleh kaum muda dengan panggilan Ustaz Felix yang terkenal dengan isi sosial medianya penuh dengan konten-konten keislaman untuk berdakwah.

Pendakwah yang mempunyai nama lengkap Felix Yanwar Siauw Chen Kwok merupakan pemuda kelahiran 1984 yang berasal dari Palembang, Sumatra

¹⁸ Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, *Kontestasi Wacana KeIslaman di Dunia Maya*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm. 249.

¹⁹ Arum Wahyuni Purbohastuti, "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi", *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 12 No. 2, 212.

²⁰ Ahmad Khotim Muzakka, "Propaganda Khilafah HTI di Indonesia", *Penelitian*, Vol. 14 No. 2, (2017), 165.

Selatan. Felix merupakan seorang keturunan Chinese (etnis Tionghoa), dia sempat menjadi atheis dengan alasan agama yang dianutnya tidak bisa memberikan kepuasan logikanya. Dia mulai mengenal Islam tahun 2002 saat menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Intitute Pertanian Bogor, ketika belajar Islam di IPB dia mulai mengenal kata “Syariat Islam” dan saat itu IPB memang menjadi kampus yang banyak diantara mahasiswanya sudah satu gagasan dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani serta gencar menyuarakan penegakkan Syariat Islam²¹. Felix Siauw juga sangat mengagumi konsep Islam yang *kaffah* (menyeluruh), pada blog kumparan yang ditulis sendiri oleh Felix Siauw yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya mulai mengenal Islam lewat penceramah yang berafiliasi dengan HTI yakni Ustaz Fatih Karim. Felix bercerita bahwa dia sudah mulai mengikuti pengajian Fatih Karim sebelum dia masuk Islam, dari pengajian tersebut berlanjut ke diskusi dan membaca buku-buku yang semuanya merupakan bagian dari kurikulum yang dipakai HTI untuk pembelajaran Islam di anggota mereka, hingga akhirnya dari proses tersebut Felix sudah merasa yakin dan memantapkan diri untuk masuk Islam pada tanggal 10 Oktober 2002 dan secara resmi mendeklarasikan diri bergabung dengan HTI pada tahun 2006.²²

Di organisasi Felix Siauw mendapatkan ruang untuk mengisi pengajian, ceramah, dan diskusi pada kalangan muda. Felix Siauw dianggap sebagai contoh yang baik bagi Islam, kaum muda begitu tertarik kepadanya karena dia berasal dari entis Tionghoa yang tidak malu untuk menyebutkan marganya yang asli,

²¹ Felix Y. Siauw, *Khilafah Remake*, (Jakarta: AlFatih Press, 2014), 110.

²² Muhammad As’ad, “Penetrasi Dakwah Islamisme Eks HTI di Indonesia: Studi Netnografi Dakwah Felix Siauw & “Yuk Ngaji” di Media Sosial”, *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 11 No. 1, (2021), 39.

kemudian inilah yang menjadi ciri khas Felix Siauw saat berdakwah. Dalam beberapa kesempatan dia menjadi orator muda untuk membangkitkan gairah perjuangan guna menegakkan *Khilafah Islamiyah* salah satunya dalam Rapat dan Pawai Akbar 1436 H yang diadakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Gelora Bung Karno Jakarta dengan judul “Bersama Umat Tegakkan Khilafah” dan di beberapa mobilisasi akbar yang bertujuan untuk mengkritik pemerintah misal (Gerakan 212 dan Aksi Bela Tauhid). Praktis sebelum HTI dibubarkan secara resmi oleh pemerintah Felix Siauw sudah menjadi kader yang sangat energik yang mampu membangkitkan gairah perjuangan HTI. Pada dasarnya Felix merupakan pemuda yang sudah menguasai ilmu marketing atau pemasaran melalui media, ini selaras dengan apa yang dilakukannya saat berdakwah dia mampu membius kalangan muda dengan kata demi kata yang diucapkan untuk menarik minat mereka guna bergabung di organisasi HTI.

Pasca organisasi tersebut dibubarkan oleh negara karena dinilai mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta stabilitas politik nasional, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para simpatisan dan kader HTI akan terus bergerak untuk terus memperjuangkan cita-cita ideologis mereka. Sama halnya dengan Felix Siauw pasca pembubaran organisasi yang berideologi *Khilafah Islamiyah* tersebut dibubarkan tahun 2017 Felix justru lebih gencar memainkan framing media sosial untuk terus mendakwahkan ideologinya, dia benar-benar paham apa yang menjadi pengikat bagi kaum muda. Sebagai kaum millennial ketertarikan pada *travelling*, *game*, serta fotografi merupakan sebuah hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi karena di era modern

ini tiga hal tersebut sangat diminati, dalam kehidupannya tiga hal tersebut juga dimiliki oleh Felix Siauw. Bahkan dia mempromosikan gagasan ke-Islaman yang menganut ideologi *khilafah* dalam kemasan visual,²³ hingga Felix menjadi salah satu seorang pendakwah sangat komunikatif kepada netizen media sosial yang bertanya perihal masalah keagamaan di kolom komentar, karena dia tahu anak muda tidak akan pernah lepas dari *gadget* atau *smartphone* dan inilah alat dakwahnya pasca HTI dibubarkan.

Sebagai bagian dari perjuangan HTI dia memiliki peran yang sentral dalam menjalankan misinya untuk terus mendakwahkan ideologi *khilafah* sebagai solusi masalah kehidupan sehari-hari manusia dan sebagai solusi terakhir untuk setiap dinamika yang terjadi di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa isi konten Felix Siauw dalam akun *Instagram*, *Twitter* dan *Youtube* miliknya yang berisi promosi ideologi yang dia yakini. Penulis benar-benar yakin bahwa Felix Siauw sadar akan modernisasi yang terjadi, karena lewat media sosial eksistensi diri bisa dibentuk bahkan jika seseorang ingin diakui eksistensinya biasanya menggunakan media sosial. Ini membuktikan bahwa secara organisasi memang HTI telah dibubarkan tetapi para simpatisannya masih tetap bergerak masif di ruang media sosial untuk terus mempromosikan ideologi mereka dengan mengisi konten media sosial dengan nilai-nilai yang berkualitas.

Generasi yang rentan terhadap pemahaman *khilafahisme* adalah generasi-Z, mereka merupakan generasi pertama yang hidup di era teknologi digital, bahkan teknologi menjadi pedoman hidup dalam proses pendewasaan diri, ini disebabkan

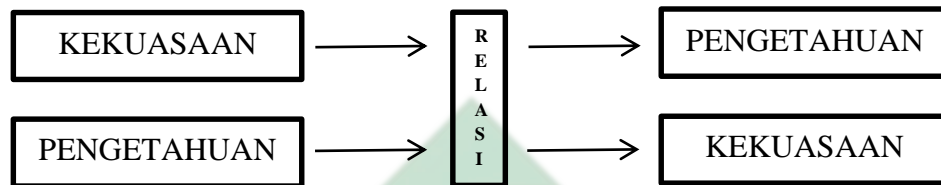
²³ Muhammad As'ad, "Penetrasi Dakwah Islamisme Eks HTI di Indonesia: Studi Etnografi Dakwah Felix Siauw & "Yuk Ngaji" di Media Sosial", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 11 No. 1, (2021), 40.

generasi-Z lahir saat segala kebutuhan digital telah ada mulai PC, perangkat gaming, ponsel, dan internet. Gen-Z ini pada umumnya lebih senang menghabiskan waktunya di dalam ruangan untuk mengakses internet guna mencari informasi yang mereka butuhkan dan bermain *game online*, mereka sangat jarang beraktivitas di luar ruangan bahkan mereka cenderung mencari pengalaman melalui internet yang tanpa kendala apapun.²⁴ Oleh sebab itu banyak pendapat yang menyatakan bahwa Gen-Z dipercaya sebagai generasi yang sangat paham teknologi dai generasi-generasi sebelumnya (termasuk generasi Millennial), karena Gen-Z mengenal dunia hanya dengan *smartphone* atau media sosial, dan mereka bukan hanya nyaman melainkan sudah pada level ketergantungan. Inilah yang kemudian menjadikan generasi ini sangat rentan terhadap gerakan *khilafahisme* yang beredar bebas di ruang media sosial, karena generasi ini akan ada di fase pencarian jati diri yang membuat mereka lebih aktif mencari pencerahan dengan mengkonsumsi literatur keislaman yang menawarkan solusi masalah moralitas dalam menjalani hidup.

Bahayanya ruang media sosial sebagai arena bebas dikarenakan didalamnya media menjadi sebuah arena untuk menyebarluaskan kekuasaan yang bersifat kohesi sosial, Michel Foucault dalam pandangannya menyatakan bahwa kekuasaan bukanlah sebagai kepemilikan seseorang terhadap sumber-sumber dan aset yang kekuasaan yang bersifat material-struktural-institusional, bagi Foucault lebih dari itu kekuasaan mengandung sebuah proses bahwa ada dominasi orang menguasai orang lain dan dikuasai. Dan bagi Foucault dimana ada relasi maka ada

²⁴ Rina Sari Qurniawati dan Yulfan Arif Nurohman, "eWOM Pada Generasi Z di Sosial Media", *Daya Saing: Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 20 No. 2, (2018), 70.

kekuasaan,²⁵ kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, lebih dari itu kekuasaan ada dimana-mana karena kekuasaan adalah satu dimensi dari sebuah relasi.



Gambar: skema kekuasaan, pengetahuan, dan relasi.

Skema diatas merupakan gambaran dari bagaimana antara kekuasaan, pengetahuan, dan relasi memiliki hubungan yang saling berkesinambungan untuk merubah atau memelihara sebuah kepentingan. Sebuah kekuasaan dengan adanya relasi mampu membuat atau mengeliminasi sebuah pengetahuan, sedangkan pengetahuan yang memiliki relasi bisa digunakan untuk menggulingkan sebuah dominasi wacana ideologi tertentu. Bagi penulis ketiga komponen tersebut saling terhubung dan memiliki perannya masing-masing, jika ada satu komponen yang tidak lengkap maka kemungkinan besar sebuah kepentingan akan gagal.

Dalam prosesnya kekuasaan memiliki kaitan erat dengan pengetahuan, pengetahuan dijadikan alat untuk mengeliminasi sesuatu yang palsu dan menetapkan yang benar.²⁶ Pengetahuan adalah apa-apa yang diucapkan seseorang dalam suatu praktek dan dispesifikasi oleh kenyataan tersebut, pengetahuan juga merupakan wilayah yang menjadikan suatu konsep bisa ditampakkan,

²⁵ Abdullah Khozin, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault", *Teosofi*, Vol. 2 No. 1, (2012), hlm. 140.

²⁶Ibid., 142.

didefinisikan, diaplikasikan, dan ditransformasikan.²⁷ Terdapat bangunan-bangunan pengetahuan yang sama sekali tidak terikat dengan sains, tetapi praktek diskursif apapun bisa didefinisikan oleh pengetahuan yang dibentuknya.²⁸ Sekilas bisa disimpulkan bahwa pengetahuan tidaklah netral dan kehendak kebenaran adalah ungkapan dari kuasa. Ideologi tidaklah bersifat kekecualian dari keilmiahan, beberapa diskursus memberikan tempat yang cukup luas bagi ideologi meskipun masih mengandung kesalahan, kontradiksi, dan tidak memiliki keobjektifan. Ketika di dalam operasi satu formasi diskursif, satu kelompok pernyataan diartikulasikan, mengklaim bisa memvalidasi (meskipun tidak sempurna) tata aturan verifikasi dan koherensi, dan ketika kelompok pernyataan tersebut menerapkan fungsi domain (apakah model, kritik, atau verifikasi) terhadap pengetahuan maka kita akan melihat sebuah formasi diskursif yang melebihi ambang batas epistemologis.²⁹ Maka bagi penulis akan sangat menarik jika pembedahan *khilafahisme* di media sosial oleh Felix bisa dibongkar menggunakan teori tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Apa yang telah disampaikan pada pembahasan latar belakang penulis menemukan beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Masih rentan terjebak *khilafahisme* yang dibuat oleh para simpatisan dan kader HTI dalam media sosial.

²⁷ Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSod, 2012), 325.

²⁸ Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSod, 2012), 326.

²⁹ *Ibid.*, 333.

2. Kurangnya tingkat pemahaman sistem *khilafah* yang diperjuangkan HTI dan apa dampak yang ditimbulkan dalam prosesnya.

C. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ditemukan, berikut rumusan masalah yang diajukan oleh penulis:

1. Bagaimana *khilafahisme* bergerak di ruang media sosial?
2. Bagaimana cara Felix Siauw di media sosial menjalankan misi *khilafahisme* menurut teori relasi kuasa-pengetahuan Michel Foucault?
3. Bagaimana kritik akademisi muslim terhadap *khilafah* Hizbut Tahrir Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas tentang penyebaran ideologi *khilafah* di masa kini, sebab penulis meyakini adanya transformasi cara dakwah hti, termasuk memahami bagaimana konsep pemerintahannya yaitu *Khilafah Islamiyah*. Selanjutnya, tulisan ini bertujuan membongkar *khilafahisme* Felix Siauw di ruang media sosial, ini disebabkan banyak pengguna internet dan media sosial menjadi *fans* Felix Siauw atas cara dakwahnya yang kekinian.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dua aspek, *pertama*, aspek teoritis yang diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan kontribusi

dalam bidang keislaman pada kalangan akademisi. *Kedua*, aspek praktis yang diharapkan bermanfaat sebagai edukasi yang berkaitan dengan isu keislaman dan ideologi kepada masyarakat secara umum dan umat Islam khususnya.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini berisi tulisan ilmiah yang telah dipilih oleh penulis untuk memberikan wacana yang akan dijadikan topik pembahasan oleh penulis.

No	Nama	Jurnal	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Ainur Rafiq Al Amin	Jurnal Teosfi: "Kritik Pemikiran Hizbut Tahrir Yang Autokratik", (Vol. 7 No. 2. 2017).	Mengapa sistem pemerintahan Autokratik yang diusung Hizbut Tahrir tidak bisa diterima di beberapa negara termasuk di Indonesia. Konsep Autokratik ini juga bertentangan dengan sistem Demokrasi yang ada di Indonesia.	Sistem Autokratik yang diusung oleh Hizbut Tahrir sangat mirip dengan konsep pemerintahan Otoriter. Ini karena dalam ajaran <i>khilafah</i> Hizbut Tahrir mewajibkan seluruh rakyat harus taat kepada khalifah. Sistem <i>khilafah</i> ini menjadikan khalifah memegang kendali sistem <i>trias politica</i> secara utuh sehingga sangat jauh dari konsep <i>social society</i> . Hal ini menandakan rakyat tidak bisa melakukan apapun untuk mengawasi kinerja pemerintahan sehingga dampak buruk yang terjadi adalah penyelewengan kekuasaan secara sepihak.

2	Ilyya Muhsin	Jurnal Wacana Hukum dan Kemanusiaan: "Gerakan Penegakkan Syariah: Studi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY", (Vol. 12 No. 1. 2012).	Kiranya kita perlu menilik lagi bagaimana gerakan sosial HTI pasca Orde Baru sekaligus proses gerakan dan konsepnya. Kesulitan penegakkan <i>khilafah</i> dipersulit oleh adanya kondisi sosial dunia yang terkotak-kotak dalam entitas negara-bangsa (<i>nation-state</i>).	Beberapa strategi HTI serta konsep yang digunakan dalam melakukan gerakan untuk menegakkan <i>khilafah</i> . Berikut poin kesimpulannya: (a) HTI sebagai partai Islam ideologis, (b) HTI memiliki struktur organisasi, (c) Gerakan sosialnya meliputi pemanfaatan peluang politik, mobilisasi struktur dengan pembinaan dan pengekaderan secara intensif dan sistematis, melakukan halaqoh 'am-daris-hizb, konferensi nasional <i>khilafah</i> , dan penyebaran ide serta prinsip hingga pertarungan wacana dengan kelompok lain.
3	Rieka Mustika	Jurnal Diakom: "Pergeseran Peran <i>Buzzer</i> ke Dunia Politik di Media Massa", (Vol. 2 No. 2. 2019).	Mengetahui peran <i>buzzer</i> yang mulai bergeser ari tujuan awalnya. <i>Buzzer</i> pada awalnya digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan ataupun tanpa imbalan.	Dari hasil penelitian yang ada, beberapa agenda politik kebelakang mulai dari Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres, <i>buzzer</i> juga ikut dalam propaganda politik. Bahkan kampanye yang dipromosikan bersifat negatif, ini yang kemudian dikhawatirkan banyak berita hoax dan memicu perselisihan.

4	Karman	Jurnal Studi Komunikasi dan Media: "Dominasi Wacana Anti-Politik Barat Pada Media Muslim Revivalis (Analisis Wacana Model Tabloid Media Umat Teun Van Dijk)", (Vol. 18 No. 2. 2014).	Bagaimana peran media elektronik yang ada di Indonesia dalam mengkritik kinerja aparatur negara, selanjutnya kritik tersebut digunakan untuk mempromosikan wacana politik anti-barat pada tabloid umat.	Hasil penelitian tabloid ini fokus sebagai delegitimasi partai politik karena ketidakmampuannya dalam melakukan perbaikan untuk Indonesia. Akar penyebabnya adalah sekularisme dan kapitalisme, argumentasi untuk mendelegitimasi berdasarkan dua hal yang berbeda. <i>pertama</i> , kinerja lembaga politik dan hukum tidak mampu memberikan kesejahteraan, tapi malah korupsi. <i>Kedua</i> , Delegitimasi atas dasar teologis, karena demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam.
5	Umi Halwati	Jurnal At-Tabsyir-Komunikasi Penyiaran Islam: "Analisis Foucault Dalam Membedah Wacana Teks Dakwah di Media Massa", (Vol. 1 No. 1. 2013).	Keberadaan produksi teks-teks media yang berisi tentang wacana dakwah perlu dianalisis. Hal ini dikarenakan teks merupakan salah satu bentuk praktek ideologi, pilihan kata juga diungkapkan untuk membawa makna ideologi tertentu dalam taraf memenangkan dukungan publik.	Media massa merupakan saluran atau mediator bagi publikasi ideologi, sehingga menjadi efektif dalam perang wacana melalui ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan dalam teks. Disamping itu media massa memiliki peran aktif sebagai penyalur informasi dan melakukan intervensi terhadap teks dakwah.

6	Irfan Sanusi	Jurnal Ilmu Dakwah: "Membedah Diskursus dan Berkreasi Dalam Ranah Pluralitas: Rereading Arkeologi Pengetahuan", (Vol. 4 No. 15. 2010).	Foucault merupakan tokoh yang suka mencari hal-hal yang menyelip di timbunan yang nyata dan terlempung lalu menuangkan pada karya-karyanya. Oleh sebab itu fokus Foucault salah satunya yakni mengungkap golongan/pemikiran yang terlupakan dan termarginalkan. Dan dalam pembahasannya fokus pada Arkeologi Pengetahuan.	Diskursus harus diteliti lebih dalam, teks apapun asalkan bermanfaat dan baik bisa dikonsumsi tanpa membeda-bedakan siapa yang menulis dan mengatakannya. Tapi disamping itu perlu kiranya untuk kita meninjau diskursus maupun teks dari sang penulis dari segi sosio-historis. Adapun 4 sikap yang bisa kita pelajari dari Arkeologi Pengetahuan yakni skeptis, mandiri, pluralis, dan kreatif.
7	Ranny Rastati	Jurnal Teknologi Pendidikan: "Media Literasi Bagi <i>Digital Natives</i> : Perspektif Generasi Z di Jakarta", (Vol. 6 No. 1. 2018).	Hal yang sering dilupakan oleh para generasi internet yakni hal-hal yang pernah diunggah ke media sosial akan sulit dihapus karena meninggalkan rekam jejak digital. Maka diperlukan sebuah edukasi bagi generasi Z sebagai <i>digital natives</i> mengenai media literasi. Sebab beberapa generasi merupakan kelompok yang menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi serta terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia.	Ada 4 cara efektif memberikan informasi media literasi: (a) video yang di <i>publish</i> melalui Youtube dan Instagram, (b) meme yang menarik dengan bahasa yang mudah dimengerti, (c) melalui selebgram yang menjadi panutan dan <i>berimage</i> positif, dan (d) papan iklan di pinggir jalan. adapun perbedaannya, laki-laki cenderung menyukai kampanye media literasi berupa video dan meme, sedangkan perempuan lebih menyukai kampanye yang dilakukan oleh selebgram <i>berimage</i> positif dan papan iklan.

8	Abdul Chalik	Islamica-Jurnal Studi Keislaman: "Fundamentalisme dan Masa Depan Politik Islam", (Vol. 9 No. 1. 2014).	Ideologi tidak akan pernah habis seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, bahkan keduanya punya hubungan yang erat. Ideologi pun berpengaruh pada suatu bangsa dan negara, dan hampir persoalan di dunia selalu bersinggungan dengan ideologi. Lalu bagaimana dengan Islam yang menjadi rujukan dalam kehidupan bagi pemeluknya, hingga muncul Islam sebagai ideologi yang merupakan bagian dari sejarah.	Yang dimaksud dengan ideologi politik Islam adalah interpretasi dari berbagai ide yang saling berkaitan dengan aliran-aliran Islam yang merefleksikan moral, kepentingan, serta komitmen sosial-politik. Dalam perkembangannya muncul berbagai diversifikasi hubungan yang bermuara pada pengejawantahan ideologi politik Islam. Salah satunya adalah formalis-substantif, konsep formalistik lebih mengedepankan bentuk daripada isi, seperti pembentukan negara yang lebih menampilkan simbol keagamaan. Sedangkan konsep substantif lebih menekankan isi daripada bentuk, dalam hal ini format negara bukan sesuatu yang penting melainkan nilai yang terkandung di dalamnya.
---	--------------	--	--	--

G. Metodologi

Dalam menganalisa permasalahan yang telah dipaparkan di atas, berikut uraian metodologi yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan memusatkan pada kajian literatur terhadap buku dan kajian akademisi atas permasalahan di

atas. Penelitian ini mengarah pada riset berbasis kepustakaan dengan analisa data berupa teks naratif.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah kajian kepustakaan. Pengumpulan data terkait judul penulisan dilakukan dengan observasi media pada akun media sosial milik Felix Siauw dengan dipusatkan pada aplikasi *Instagram*, *Twitter*, dan *Youtube*.

3. Pendekatan dan Analisis Data

Penulisan ini menggunakan pendekatan analisis wacana, judul “Ideologi Khilafah Felix Siauw Di Media Sosial Perspektif Kuasa-Pengetahuan Michel Foucault” merupakan objek material berupa bahasa dengan kandungan makna tertentu bagi golongan Islamis dalam mempropagandakan gagasannya. Objek formal yang digunakan untuk menganalisa data permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah kuasa-pengetahuan Michel Foucault.

H. Sitematika Pembahasan

Penelitian berjudul “Ideologi Khilafah Felix Siauw Di Media Sosial Perspektif Kuasa-Pengetahuan Michel Foucault” yang disusun oleh penulis akan dijelaskan dengan sistematis menggunakan bahasan bab, berikut susunannya:

Bab I Menjelaskan tentang hendak diarahkan kemana penulisan ini serta mencakup semua rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, serta metode yang digunakan penulis untuk penelitian ini.

- Bab II Pada bab ini penulis akan menjelaskan sejarah Hizbut Tahrir hingga masuk ke Indonesia termasuk proses pembubarannya, dan Biografi serta relasi kuasa-pengetahuan Michel Foucault.
- Bab III Bab ini berisi biografi Felix Siau, termasuk beberapa fakta narasi- konten di media sosialnya di akhir pembahasan, dan mengenal Gen-Z.
- Bab IV Membongkar *khilafahisme* Felix di media sosial menggunakan teori relasi kuasa-pengetahuan Michel Foucault.
- Bab V Di bab terakhir ini meliputi jawaban dari apa yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan serta memberikan saran terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

ANCAMAN IDEOLOGIS HTI DAN MICHEL FOUCAULT

A. Profil, Tujuan, dan Metode Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir lahir di al-Quds Palestina pada tahun 1953, pendirinya adalah Taqiyuddin an-Nabhani. Hizbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik internasional yang berideologi Islam, dalam kata lain ajaran Islam menjadi pondasi utama dalam gerakan dan dakwahnya termasuk ide, gagasan, hukum-hukum dan persoalan kehidupan umat senantiasa disandarkan pada ajaran Islam. Sebagai organisasi politik maka Hizbut Tahrir tidak bisa lepas dan dilepaskan dari aktivitas politik, lebih jauh lagi gerakan ini sebagai isyarat bagi kaum muslim bahwa umat Islam harus sadar politik karena Hizbut Tahrir menilai umat Islam sudah lama mengalami keterpurukan sejak abad ke-19 M dan mengalami keterpurukan atas penjajahan barat hal itu terjadi sejak runtuhnya Dinasti Utsmani di Turki tepat pada bulan Maret 1924, hingga sebagian umat Islam menginginkan agar *khilafah* terus ditegakkan disalah satu negara selain Turki, inilah faktor historis yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir.

Sedangkan faktor normatif semangat pendirian Hizbut Tahrir adalah dalam ayat suci Al-Qur'an Surat Ali-Imron [3]: 104. Dengan demikian berdirinya Hizbut Tahrir merupakan kepedulian atas keterpurukan umat Islam dan ajaran Islam menjadi *glorifikasi* tersendiri bagi setiap kader Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mendefinisikan dirinya sebagai partai politik Islam yang membimbing umat serta

mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah* untuk menegakkan hukum Allah dalam realitas kehidupan umat secara *kaffah*.

Bagi Hizbut Tahrir kemajuan umat Islam harus diraih dengan pencerahan dan mencerdaskan, dalam pandangannya kekuatan-kekuatan Islam harus membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sudah lama terjadi. Hizbut Tahrir berkomitmen membebaskan umat Islam dari sistem dan perundang-undangan yang tidak islami (*kufur*) serta melepaskan umat Islam dari cengkraman negara-negara sekuler, tujuan Hizbut Tahrir sudah sangat jelas yakni mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah*.¹ Hal tersebut selaras dengan sikap Hizbut Tahrir yang tegas menolak segala macam hegemoni barat² mulai dari ideologi, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Sebaliknya, Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide, pendapat, gagasan, dan hukum-hukum berasal dari *fikrah* Islam, segala sesuatu yang tidak islami tidak akan berlaku bagi Hizbut Tahrir dan dianggap *kufur*.

Layaknya organisasi secara umum, tentunya Hizbut Tahrir memiliki misi khusus dalam gerakannya dalam mendakwahkan ide dan gagasannya. Tujuan dakwah Hizbut Tahrir bisa dilihat dalam tiga aspek. *Pertama*, pada aspek doktrinasi bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai ajaran Islam sebagai pedoman dasar dalam segala aspek kehidupan. Hizbut Tahrir melihat umat Islam sudah terlalu lama meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang langsung bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dan harus dijalankan secara *kaffah*, untuk mewujudkan

¹ Nilda Hayati, "Konsep *Khilafah Islamiyyah* Hizbut Tahrir Indonesia Studi *Living al-Qur'an* Perspektif Komunikasi", *Episteme*, Vol. 12 No. 1, (2017), 171.

² Akhiyat dan Din Usuluddin, *Negara Utopia Eks Hizbut Tahrir Indonesia*, (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 3.

itu Hizbut Tahrir memerlukan sebuah kekuasaan dan patron negara. Sistem pemerintahan yang mutlak diterima Hizbut Tahrir hanyalah *Khilafah Islamiyyah*.

Kedua, dalam aspek sosial politiknya Hizbut Tahrir memiliki komitmen besar untuk membebaskan umat Islam dari segala imperialisme, baik secara fisik, ide, materi, pemikiran, bahkan doktrin. Selaras dengan tujuannya, Hizbut Tahrir sangat konsisten untuk mengangkat isu agenda terselubung imperialisme barat yang membuat umat Muslim menjadi korban atas kebobrokkannya..

Ketiga, dakwah Hizbut Tahrir juga disampaikan kepada masyarakat non-Musim karena Islam adalah agama *rahmatan lilalamin*, agama yang diturunkan dari langit untuk menyelamatkan manusia dari segala macam kerusakan yang terjadi di bumi.³

Adapun tiga metode yang digunakan oleh Hizbut Tahrir:

a. Tahap *Tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan)

Pada tahap ini Hizbut Tahrir memiliki tujuan untuk melahirkan kader-kader yang memiliki *fikrah* (ide) yang berasal dari nilai-nilai ajaran Islam *ala* Hizbut Tahrir sebagai landasan dalam bergerak. Fase ini untuk mengajarkan kerangka politis, menguatkan tekad para aktivis untuk terus melakukan perjuangan dan sangat mungkin pemikiran Hizbut Tahrir akan terus berjalan serta berkembang dari masa ke masa.

b. Tahap *Tafa'ul* (interaksi)

Interaksi yang dimaksud ini adalah interaksi sosial, interaksi ini lebih mengedepankan proses dakwah untuk mengajak umat Muslim agar

³ Akhiyat dan Din Usuluddin, *Negara Utopia Eks Hizbut Tahrir Indonesia*, (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 23.

menjadikan nilai-nilai Islam menjadi pondasi utama dalam kehidupan dan menjadi solusi bagi segala permasalahan hidup. Tahap ini untuk meraih simpati masyarakat dan juga menyatukan pemahaman tentang kondisi umat.

c. Tahap *Istilamul Hukmi* (menggambil alih kekuasaan)

Inilah tahap final dari segala proses perjuangan ideologis Hizbut Tahrir dimana mereka menargetkan perubahan kekuasaan menjadi *Khilafah Islamiyyah* untuk memperluas wilayah kekuasaan umat Islam serta tegaknya *khilafah* menjadi alat bagi Hizbut Tahrir untuk menjalankan agama secara total dan menyeluruh dengan adanya sistem yang telah mereka kuasai.⁴

B. Perbedaan Khilafah dan Khalifah

Khalifah secara bahasa berarti wakil (pengganti nabi Muhammad SAW) setelah nabi wafat untuk terus melanjutkan kekuasaan Islam dalam urusan agama dan negara dalam menjalankan syariat Islam. *Khalifah* juga merupakan gelar kepada kepala agama dan raja di negara Islam, secara terminologi *khilafah* adalah jabatan keagamaan yang dipegang oleh *Imam al-A'zham* (penguasa tertinggi atau kepala negara)⁵ dalam mengurus dan menjalankan segala urusan umat dalam koridor syariat Islam.

Adapula yang menafsirkan bahwa *khilafah* adalah lembaga pemerintahan dalam Islam yang dipimpin oleh penguasa Islam (khalifah, sultan, atau syah), istilah *khilafah* bersinonim dengan *imamah* (pemerintahan) yang muncul dalam sejarah peradaban Islam sebagai institusi politik, sedangkan yang memimpin

⁴ Mohamad Rofiuddin, "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir *vis a vis* NU), *Islamuna*, Vol. 2 No. 1, (2015), 36.

⁵ Arifin Zain, "Khilafah Dalam Islam", *Al Idarah*, Vol. 3 No. 1, (2019), 49.

khilafah disebut *khalifah*.⁶ *Khilafah* juga didefinisikan sebagai lembaga politik yang bermula pada fase sepeninggal nabi yang dikenal dengan sebutan *khulafaur rasyidin* (para pembimbing yang terbimbing).⁷ Secara *history* munculnya istilah *khilafah* dan *khalifah* berawal dari terpilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW sehari setelah wafatnya Rasulullah. Selanjutnya estafet kepemimpinan setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, selanjutnya Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Keempat *khalifah* tersebut dinamakan *al-khulafa ar-rasyidin* yaitu *khalifah* yang terpercaya atau yang mendapat petunjuk, bahkan keempat *khalifah* tersebut dikenal sebagai pemimpin yang amat taat dan setia pada agama, dan merupakan *khalifah* ortodoks (berpegang teguh pada ajaran dan keyakinan). Gelar *Khulafaur Rasyidin* bukan karena kebetulan melaikan karena kapasitas mereka sebagai kepala negara dan pemimpin agama Islam dalam segala aspek kehidupan sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Dalam sejarahnya, konsep ini memiliki banyak sekali catatan merah diantaranya adalah yang terjadi di masa perodesasi Islam pertama dimana muncul perpecahan dan pertikaian antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawwiyah bin Abi Sofyan, masing-masing berusaha mencari legitimasi kekuasaan dari Al-Qur'an dan Hadits untuk mengukuhkan legalitas kekuasaan yang diklaim. Bahkan dalam konsep pemilihan seorang *khalifah* pun terjadi perbedaan satu sama lain, Abu Bakar diangkat dengan cara baiat di Bani Tsaqifah, pengangkatan Umar bin Khattab didasari pada rekomendasi yang berasal dari Abu

⁶ Arifin Zain, "Khilafah Dalam Islam", *Al Idarah*, Vol. 3 No. 1, (2019), 42.

⁷ Sadari, "Agama dan Negara Menakar Pandangan HTI Tentang Khilafah dan Demokrasi", *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin*, Vol. 1 No. 1, 4.

Bakar. Sedangkan Utsman bin Affan diangkat melalui musyawarah (syura) dan Ali bin Abi Thalib melalui baiat. Sedangkan periode berikutnya sistem pemerintahan bersifat kerajaan atas dasar garis keturunan hal ini terbukti terjadi mulai Dinasti Muawwiyah, Dinasti Abbasiyah, hingga Dinasti Utsmani di Turki.⁸

Di tahun 1926 wacana mengembalikan *khilafah* muncul diselimiuti kontroversi, bahkan melahirkan konflik internal dalam umat Islam sendiri. Ini terjadi kala Konferensi *Khilafah* digelar di Kairo Mesir pada bulan Maret 1926 namun hasilnya tidak memuaskan bahkan ada konferensi tersebut adalah rancangan pemikiran raja Fuad yang didukung Inggris Raya. Di tahun berikutnya 1927 M, Arab Saudi menggagas Konferensi Islam Internasional namun gagasan yang dihasilkan tidak terealisasi dan hingga kini model pemerintahan yang diinginkan oleh sebagian umat Islam itu juga tidak terwujud.⁹

Alasan dasar tidak terwujudnya konsep *khilafah* yakni di dalam Al-Qur'an sendiri tidak mengungkapkan teori dan konsep negara, tetapi menurut Syafii Maarif ada dua alasan yang menjadikan Al-Qur'an tidak menjelaskan al tersebut; *pertama*, Al-Qur'an adalah petunjuk etik bagi umat manusia bukan sebagai kitab politik, *kedua*, sebuah kenyataan bahwa institusi sosio-politik dan organisasi manusia dari masa ke masa.¹⁰ Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kebekuan hukum-hukum kenegaraan dalam setiap periode sejarah umat manusia serta pada dasarnya Al-Qur'an adalah kitab yang memuat pesan-pesan, petunjuk, dan perintah moral bagi kepentingan hidup manusia. Oleh sebab itulah kitab suci ini

⁸ Ahmad Iwan Zunaih, "Khilafah: Sistem Pemerintahan Yang Profan", *Jurnal Ummul Quro*, Vol. 4 No. 2, (2014), 3.

⁹ Ibid., 4.

¹⁰ Oksep Adhayanto, "Khilafah Dalam Pemerintahan Islam", *Jurna Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, (2011), 85.

tidak pernah menjelaskan secara gamblang dan rinci tentang bentuk masyarakat sipil dan nonsipil hingga bentuk negara yang harus diciptakan umat Islam sepanjang sejarah.

C. Perjalanan Hizbut Tahrir Indonesia

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia terjadi pada tahun 1982, tokoh utamanya adalah M. Mustofa dan Abdurrahman Al-Baghdadi, Mustofa merupakan putra dari Abdullah bin Nuh pengasuh pondok pesantren Al-Ghazali Bogor, seorang ulama sekaligus dosen fakultas Sastra Universitas Indonesia. Mustofa sendiri merupakan alumni Perguruan Tinggi di Yordania, dia mengenal Hizbut Tahrir saat menempuh pendidikan di Yordania. Sedangkan Abdurrahman merupakan aktivis Hizbut Tahrir yang berasal dari Lebanon yang imigrasi ke Australia, yang kemudian Abdullah bin Nuh memintanya untuk membantu mengajar di pondok pesantrennya.¹¹ Abdurrahman tidak hanya berdakwah di lingkungan pondok pesantren Al-Ghazali saja, alhasil keduanya Abdurrahman dan Mustofa menjadi aktivis Hizbut Tahrir pertama yang mengenalkan pemikiran dan gagasannya di lingkungan akademik melalui mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga tidak sedikit mahasiswanya termasuk santri Abdullah bin Nuh.

Selanjutnya, Abdurrahman Al-Baghdadi menjadikan masjid kampus IPB sebagai basis rekrutmen HTI di awal perkembangannya,¹² inilah yang kemudian

¹¹ Ilyya Muhsin, "Gerakan Penegakan Syariah: Studi Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia di DIY", *Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, (2012), 47.

¹² Abdul Qohhar dan Kiki Muhamad Hakiki, "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran", *Kalam*, Vol. 11 No. 2, (2017), 369.

mereka menjadikan mahasiswa sebagai ladang perekrutan untuk menyebarluaskan pandangan Hizbut Tahrir, saat mahasiswa yang bergabung mulai bertambah, Abdurrahman, Mustofa, dan Abdullah bin Nuh mulai mengorganisir pendidikan sistematis melalui halaqoh dan *training*. Di tahun 1994 HTI memulai aktivitasnya ke publik tetapi belum berani memakai identitas Hizbut Tahrir, disini HTI mulai membentuk aktivitas-aktivitas dan *stakeholder* yang terselubung (*undercover*) seperti majalah, penerbitan buku, pamflet, dan seminar-kajian mingguan.

Bangkitnya gerakan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik yang ada, hegemoni tersebut setidaknya berawal dari berlakunya Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 yang berlanjut pada rezim 1967. Imbasnya jelas yaitu terjadi hegemoni terhadap umat Islam di Indonesia, sikap ueforia umat Islam dimulai ketika rezim Soeharto jatuh (1998), kondisi ini membuka kesempatan untuk perkembangan gerakan Islam di Indonesia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.¹³ Ini dibuktikan dengan menjamurnya partai Islam, kelompok Islam, hingga gerakan Islam radikal, pada bulan Mei tahun 2000 HTI berani menunjukkan eksistensinya ke ruang publik dengan menyelenggarakan konferensi internasional *khilafah* di Stadion Senayan Jakarta.

Melalui forum tersebut secara terbuka mereka menyebarluaskan ide, gagasan, dan program kepada masyarakat luas. Isu yang diangkat saat itu adalah pentingnya mengembalikan *khilafah* sebagai respon terhadap permasalahan umat. Sejak tahun 2000 HTI mulai masif dalam mewujudkan cita-citanya, pada fase ini dapat diartikan bahwa mereka memulai mobilisasi secara terbuka yang berarti

¹³ Ahmad Khotim Muzakka, "Propaganda Khilafah HTI di Indonesia", *Penelitian*, Vol. 14 No. 2, (2017), 164.

mereka mulai bergerak dari tahap pembinaan ke tahap interaksi dengan masyarakat luas.¹⁴

Perjuangan HTI tidak sia-sia, di tahun 2006 mereka mendapatkan restu (pengakuan) dari Negara Indonesia. Legalisasi ini menjadikan HTI semakin leluasa untuk bergerak menyebarkan ide dan gagasannya kepada umat muslim di Indonesia, lebih luas dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang hanya masuk dikalangan mahasiswa atau kampus dan komunitas muslim. Seruan *khilafah* HTI mulai merambah seperti, seminar yang diadakan oleh Instansi Pemerintahan dan hotel-hotel. Dengan jangkauan yang semakin luas ini HTI mulai percaya diri bahwa mereka akan berhasil untuk menegakkan *Khilafah Islamiyyah* di Negara Indonesia, mereka mulai mengupayakan tahapan terakhir mereka yaitu mencari dukungan kepada tokoh-tokoh kuat dan berpengaruh untuk bersama mengambil alih kekuasaan.

Penegakkan *khilafah* telah menjadi obsesi bagi organisasi ini, *khilafah* adalah suatu ajaran Islam prinsipil yang telah lama terabaikan, sebuah keadaan yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Untuk mencapai tujuannya HTI tidak masuk lewat politik parlemen melainkan lebih mengkonsentrasikan pada penyiapan kader serta pembimbingan umat. Selain itu, HTI juga aktif dalam proses pembentukan opini di tengah masyarakat yang berkaitan dengan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam perspektif Islam.¹⁵ Dengan demikian fokus perjuangan mereka bukanlah melalui pemilu, melainkan melalui penyadaran

¹⁴ Abdul Qohhar dan Kiki Muhamad Hakiki, "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran", *Kalam*, Vol. 11 No. 2, (2017), 372.

¹⁵ Bambang Prasetyo, "Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 19 No. 2, (2019), 258.

umat, HTI menilai bahwa perjuangan melalui pemilu hanya memiliki efek yang sifatnya jangka pendek dan makin merugikan kondisi umat karena akan terpecah belah akibat terlalu banyaknya partai politik Islam dalam pemilu.

Jika kita memahami dengan seksama perjalanan HTI mereka sangat konsisten terhadap cita-cita mereka, komitmen mereka hampir tidak pernah bergeser sedikitpun. Organisasi ini memiliki daya tarik dari segi konsistensi, mereka amat gencar memaparkan solusi umat Islam dengan bahasa yang sangat runtut dan sistematis, bahkan mereka tidak basa basi untuk memberikan pemahaman atau solusi dalam segala *problem* aspek kehidupan.

Secara gamblang mereka menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka, hingga siapapun bisa bicara syariah dan *khilafah* dalam perspektif HTI. Namun, apapun bentuk serta tujuan yang diusung oleh mereka, sangat jelas itu membawa dampak sosial dan mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Bahkan di beberapa negara Timur Tengah sendiri Hizbut Tahrir menjadi organisasi terlarang.¹⁶

Pasca keputusan pemerintah Republik Indonesia merevisi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, muncul gagasan tentang klausul penistaan negara.¹⁷ dimana yang dimaksud dalam hal ini adalah pengingkaran atas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang final. Dengan demikian, dalam UU Terorisme baru terdapat ancaman penjara atas orang, kelompok, serta organisasi yang mengharamkan Negara

¹⁶ Bayu Marfiando, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau Dari Kebebasan Berserikat", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No. 2, (2020), 91.

¹⁷ Syaiful Arif, "Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia", *Aspirasi*, Vol. 7 No. 1, (2016), 102.

Kesatuan Republik Indonesia karena memimpikan tegaknya sistem negara lain, misalnya *Khilafah Islamiyyah*, ini juga termasuk bagian dari deradikalisasi yang dimasukkan untuk menyempurnakan pendekatan represif atas terorisme.

HTI bukanlah organisasi pertama yang dibubarkan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Secara fakta sejarah hubungan golongan agamis dan nasionalis tidaklah pernah harmonis dan akomodatif. Inti dari ketidakdinamisan ini terjadi pada pandangan ideologi negara dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Kedua kelompok tersebut melakukan kompromi politik dengan diselimuti rasa curiga, hingga pasca kemerdekaan muncul berbagai pemberontakan yang ingin mengganti ideologi negara yaitu Darul Islam Indonesia (DII), Tentara Islam Indonesia (TII), dan beberapa aktivis yang bergabung dalam jama'ah Islamiyyah.¹⁸

Berangkat dari konsekuensi demokrasi yang memberikan kebebasan termasuk kelompok anti demokrasi, dalam arti lain jika para kaum radikal Islam ingin mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia kedalam bentuk *khilafah* dia tidak bisa disalahkan demi konsistensi demokratik. Gerakan radikal dapat dilarang apabila melakukan tindakan kriminal, sehingga pelarangannya ditentukan oleh keputusan hukum dari pengadilan, disini kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan ideologi dari sebuah negara tidak dianggap kriminal,¹⁹ sejauh dia tidak melanggar hukum. Hal ini juga dilatari atas pemahaman bahwa para pejuang *khilafah* tidak akan mampu makar dan melakukan tindakan kudeta. Tetapi mereka

¹⁸ Zulfadli, "Orientasi Politik Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan", *Kontekstualita*, Vol. 33 No. 2, (2018), 174.

¹⁹ Syaiful Arif, "Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Kenegaraan", *Aspirasi*, Vol. 7 No. 1, (2016), 102.

melakukan gerakan *black education* terhadap kenegaraan Indonesia melalui pengharaman atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, upacara, serta simbol kebangsaan Indonesia.

Apapun kegiatan dan gagasan yang diusung oleh HTI secara eksplisit menimbulkan ancaman bagi kerukunan umat beragama di Indonesia, meskipun HTI mengklaim bahwa mereka adalah gerakan dakwah, namun secara praktiknya mereka melakukan aktivitas politik. Terbukti mereka menempatkan diri sebagai kekuatan politik oposisi pemerintah yang tidak menerapkan sistem politik yang syari'ah, Islami, dan menegakkan hukum Islam. Mereka sangat keras menolak sistem politik yang berasal dari barat seperti, *nation state*, nasionalisme, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan *trias politica*,²⁰ mereka hanya mau menerima sistem berlandaskan ajaran Islam yang *kaffah*.

Salah satu alasan kuat mendirikan *Khilafah Islamiyyah* menurut HTI adalah sistem politik demokrasi merupakan representasi dari ideologi Sekulerisme dan Kapitalisme. Sedangkan HTI dalam selebarannya *al-banshasila Falsafah Kufr la tattafiq ma'al Islam* (Pancasila Falsafah Kufur Tidak Sesuai dengan Islam),²¹ mereka mengkafirkan Pancasila karena memuat pluralisme (kebhinekaan) agama.

Menyikapi fenomena tersebut, muncul desakan bagi pemerintah untuk mengambil langkah hukum yang tegas, hasilnya pemerintah Indonesia melalui proses pengkajian yang panjang, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

²⁰ Zulfadli, "Orientasi Politik Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan", *Kontekstualita*, Vo. 33 No. 2, (2018), 179.

²¹ Syaiful Arif, "Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia", *Aspirasi*, Vol. 7 No. 1, (2016), 102.

dan Keamanan, Wiranto, pada 8 Mei 2017 menyatakan bahwa organisasi HTI dilarang eksistensinya di Indonesia. Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) melalui Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, kemudian resmi mencabut Surat Ketetapan (SK) Badan Hukum HTI terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017, keputusan pencabutan Surat Ketetapan (SK) Putusan oleh Kemenkum HAM tersebut berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 10 Juli 2017.²²

Tepat pada 18 Juli 2017 pihaknya mengajukan uji formil dan uji meteril terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan pada tanggal 13 Oktober 2017 pihaknya menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam gugatannya HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017²³ tentang Pencabutan Status Hukum Organisasi Masyarakat tersebut dibatalkan.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkum HAM sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada Juli 2014, pada saat itu permohonan diajukan secara elektronik atau website <http://www.ahu.go.id>.

Beberapa alasan dikemukakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pembubaran HTI yakni:

²² Bayu Marfiando, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau Dari Kebebasan Berserikat", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 4 No. 2, (2020), 91.

²³Ibid., 92.

1. Sebagai organisasi masyarakat yang berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan nasional.
2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh HTI terindikasi kuat bertentangan dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.
3. Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Pada tanggal 19 Juli 2017 HTI resmi dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia dan organisasi tersebut tidak diperkenankan untuk mengadakan kegiatan apapun serta menunjukkan identitas organisasi karena eks-HTI telah bersifat ilegal.

Diakhir penjelasan bab ini, penulis akan menyajikan biografi dan sekilas teori Kuasa-pengetahuan Michel Foucault. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembubaran eks-HTI tidak menjamin mereka berhenti, di satu sisi adalah sebuah pengetahuan yang disampaikan di ruang publik untuk menarik simpati masyarakat, dan disisi lain mereka memiliki obsesi dengan sebuah kekuasaan. Dua hal tersebut memiliki pengaruh kuat dalam proses gerakan ideologis, keduanya juga memiliki kaitan erat untuk memproduksi sebuah wacana untuk dikonsumsi publik secara bebas. Maka penulis memilih Kekuasaan-

²⁴ Bambang Prasetyo, "Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 19 No. 2, (2019), 259.

Pengetahuan Foucault sebagai alat analisis untuk membongkar apa yang kini dilakukan oleh simpatisan dan kader eks-HTI.

D. Biografi dan Relasi Kuasa-pengetahuan Michel Foucault

Michel Foucault (1926-1984) lahir di Poitiers, Perancis, ia lahir dari keluarga Katholik yang taat, ayahnya merupakan seorang praktisi kedokteran dan berharap anaknya (Foucault) mengikuti jejak sang ayah, tetapi ia justru lebih tertarik dalam dunia sejarah, filsafat, dan psikologi.²⁵ Foucault adalah seorang pemikir dan cendekiawan Perancis terkemuka abad ke-20, pengetahuannya sangat luar biasa, dia memberikan perhatian khusus dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pengetahuan luasnya yang mencakup segala bidang, sulit menempatkan Foucault sesuai dengan spesialisasinya, meskipun dia meninggal sudah tiga dekade lebih namanya tetap dikenang sebagai analisis dan pemikir besar yang mewariskan ajaran dan kebijaksanaan untuk para pemikir dan peminatnya masa kini dan masa yang akan datang.

Foucault dididik di Perancis dalam lingkungan akademik-ilmiah, Foucault mengenyam pendidikan di sekolah yang baik, hingga dia mengajar di sekolah dan universitas ternama di Perancis. Sejak dini dia sudah mulai belajar kritis dan cermat. Hal ini didukung oleh dunia pendidikan di Perancis yang mengajarkan pelajaran filsafat sejak usia Sekolah Menengah Atas hingga dalam usia yang cukup dini siswa sudah diajarkan untuk memiliki disiplin dalam berpikir, membuat analisis dan menyampaikan pendapat. Di Perancis jurusan filsafat sangat

²⁵ Abdullah Khozin, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault", *Teosofi*, Vol. 2 No. 1, (2012), 133.

diminati oleh hampir semua mahasiswa, mereka disiapkan dan menyiapkan diri untuk menjadi tenaga pendidik di sekolah-sekolah²⁶. Keterbukaan dan kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat sangat terasa di seluruh Perancis, yang akhirnya membuat situasi kompetitif dikalangan siswa dan mahasiswa sangat kentara, maka tidak heran jika ada begitu banyak pemikir dan penemu dunia terkenal yang berasal dari Perancis.

Secara *general* kekuasaan selalu dikaitkan dengan sebuah rezim atau penguasa. Kekuasaan seringkali dipahami sebagai hubungan kepemilikan seperti halnya hak istimewa, properti, atau sebuah perolehan, dalam dunia filsafat tradisional, orientasi kekuasaan akan menuju pada sebuah legitimasi, karena kekuasaan adalah sesuatu yang dapat dilegitimasi secara metafisis yang memungkinkan semua individu harus mematuhi. Kata kekuasaan melekat erat dengan sebuah negara, ini karena negara merupakan superstruktur yang memiliki relasi dengan seluruh rangkaian jaringan kekuasaan hingga pada level investasi (tubuh, keluarga, pengetahuan, teknologi, dan seterusnya). Investasi tersebut bisa dilihat dari hukum yang diproduksi dan kekuatan represif untuk menormalisasi. Namun, Foucault memandang kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki seperti halnya sebuah negara, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat, maka kekuasaan harus dipandang sebagai relasi-relasi yang tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis.²⁷

²⁶ Konrad Kebung, "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di Indonesia", *Jurnal Melintas*, Vol. 33 No. 1, (2017), 36.

²⁷ Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18 No. 1, (2013), 78.

Menurutnya kekuasaan bukan sebagai kepemilikan seseorang terhadap sumber-sumber atau aset kekuasaan tertentu yang bersifat material-struktural-institusional, melainkan kedaulatan yang diperoleh melalui disiplin dan berbagai kohesi sosial. Dalam teorinya, Foucault fokus bukan terhadap kekuasaan politik dalam hirarki pemerintahan atau struktur sosial, melainkan kekuasaan yang bersifat menyebar.²⁸ Kekuasaan selalu dibayangkan ada seseorang yang menjadi penguasa dan yang lain dikuasai, bagi Foucault lebih daripada itu kata kuasa diakuinya menjadi perantara bagi individu untuk mengerti makna dominasi dalam arti ada orang menguasai yang lain dan dikuasai, ini merupakan sebuah perwujudan dari sebuah kekuasaan yang berjalan pada tubuh-tubuh individu.²⁹

Arti kuasa menurut Foucault sangat netral dan kuasa itu ada dalam setiap diri seseorang,³⁰ hal ini perlu ditegaskan karena pemaknaan kuasa sering disalah pahami sebagai sesuatu yang berat sebelah, dalam arti ada pihak yang lemah yang selalu ditekan dan ada pihak yang kuat serta berpengaruh yang selalu mendominasi yang lain. Dengan pengertian lain, bagi Foucault keefektifan kekuasaan sangat dibutuhkan, kekuasaan harus mampu memperoleh akses pada tindakan, sikap, dan mode tingkah laku setiap hari dari seorang tubuh individual,³¹ ini digunakan untuk memastikan bahwa kekuasaan berjalan dengan jalur yang ditentukan.

²⁸ Iswandi Syahputra, "Post Media Literacy ; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Faoucault", *Jurnal Aspikom*, Vol. 1 No. 1, (2010), 3.

²⁹ Michel Foucault, *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santosa, (Yogyakarta: Narasi, 2017), 74.

³⁰ Konrad Kebung, "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di Indonesia", *Jurnal Melintas*, Vol. 33 No. 1, (2017), 41.

³¹ Michel Foucault, *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santosa, (Yogyakarta: Narasi, 2017), 162.

Ada dua fenomena disiplin yang diuraikan Foucault agar kekuasaan dan kuasa dapat berjalan baik. *Pertama*, semacam menara pengawas, sebagai yang mengatur sebuah kekuasaan perlu adanya kemampuan untuk mengawasi semua yang berada dibawah kendali. *Kedua*, menormalkan penilaian moral atau menghukum para pelanggar moral, ini bertujuan untuk mendisiplinkan setiap individu yang keluar atau menyimpang dari batas-batas yang telah ditentukan.

Oleh sebab itu kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara (yang bisa diukur), jauh daripada itu, kekuasaan ada dimana-mana karena kekuasaan adalah satu dimensi dari sebuah relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan.³² Jadi kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari sebuah relasi-relasi antara pelbagai kekuatan yang terjadi secara mutlak. Kekuasaan menurutnya merupakan sebuah strategi yang berlangsung dimana-mana dan memuat sebuah sistem, aturan, dan regulasi. Kuasa ini beroperasi pada relasi-relasi antar manusia, dan relasi ini mampu berjalan dalam sebuah ruang kebudayaan dan komunikasi manusia. Kuasa ini bisa berjalan secara represif dan dominatif, ini yang sangat mudah untuk dipahami bahwa setiap individu mampu menguasai individu lain, dan lebih dari itu kuasa juga digunakan sebagai strategi.

Pusat pemikiran Foucault terletak ‘bukan pada apa itu kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu bekerja dan dijalankan’, perspektif inilah yang akan menghantarkan kita kepada pembahasan kekuasaan dan pengetahuan. Bagaimana pengetahuan dan kekuasaan tersebut bekerja? Menurut Foucault, keduanya bekerja melalui bahasa, sebab pada tingkat yang paling dasar ketika seseorang

³² Abdullah Khozin, “Konsep Kekuasaan Michel Foucault”, *Teosofi*, Vol. 2 No. 1, (2012), 140.

belajar berbicara, membaca, menerima pengetahuan dasar, dan aturan-aturan pada waktu yang sama.³³ Sedangkan sebuah wacana muncul bersandar pada definisi-definisi ilmiah yang menggambarkan adanya suatu ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada praktik sosial.³⁴

Pada relasi kekuasaan dan pengetahuan, Foucault ingin menunjukkan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, diskursus ilmu pengetahuan pada prosesnya dijadikan sebuah pembeda antara yang benar dan palsu atas kehendak untuk berkuasa dan ilmu pengetahuan dilaksanakan untuk menetapkan apa yang benar dan mengeliminasi yang palsu. Sekilas bisa disimpulkan bahwa kehendak kebenaran adalah ungkapan dari kehendak untuk berkuasa, dan pengetahuan tidak bersifat netral dan murni. Disini terjadi korelasi antara pengetahuan mengandung kuasa dan sebaliknya, maka munculnya suatu penjelasan ilmiah bertujuan untuk menyingkirkan suatu penjelasan ilmiah yang lain.

Pengetahuan yang muncul selalu di produksi oleh individu yang memiliki otoritas pada ruang keilmuannya, para intelektual inilah yang dianggap mampu untuk memproduksi sebuah wacana pengetahuan yang dilahirkan secara akademik dan teoritis. Ini yang kemudian dipahami bahwa para intelektual telah dikuasai oleh kekuasaan politik dan ini merupakan relasi sebuah pengetahuan ilmiah dengan sebuah institusi atau kelompok. Lebih spesifik yang dimaksud intelektual tersebut adalah intelektual dalam makna politis bukan sosiologis, dengan kata lain

³³ Iswandi Syahputra, "Post Media Literacy ; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault, *Jurnal Aspikom*, Vol. 1 No. 1, (2010), 4.

³⁴ Abdul Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18 No. 1, (2013), 82.

mereka merupakan orang-orang yang memanfaatkan pengetahuan, kompetensi dan relasinya hanya untuk perjuangan politis.³⁵

Kantrin Bandel memberikan contoh bahwa pengetahuan tidak diproduksi secara bebas, karena ada batas-batas mengenai apa yang diterima dan tidak, siapa yang berbicara dan dalam konteks apa. Misalnya dalam bidang keagamaan, pengetahuan akan dianggap benar jika didasarkan pada teks-teks yang dianggap memiliki otoritas seperti Al-Qur'an dan hadits. Maka siapapun yang ingin masuk dalam diskursus ini maka harus mengikuti peraturan tersebut jika kontribusi pemikirannya ingin dianggap sah, jika tidak mengikuti aturan permainan diskursus tersebut maka akan terjadi sebaliknya dan tidak jarang yang mempersepsinya bukan sekedar pengetahuan, tetapi sebagai suatu kebenaran.³⁶

Ini yang kemudian menjadi alasan kuat mengapa para intelektual dijadikan produsen wacana pengetahuan untuk membentuk sebuah kuasa, karena para intelektual memiliki otoritas untuk menyampaikan sistem pengetahuan yang menunjukkan hubungan kuat dengan relasi sosial. Meskipun pada kenyataannya setiap masyarakat akan memilih suatu pengetahuan yang dianggap sebagai kebenaran, setiap wacana diterima dan difungsikan sebagai sesuatu yang benar karena masih terdapat mekanisme dan instansi yang memampukan orang membedakan pernyataan-pernyataan yang benar dan keliru.

Selain itu ilmu pengetahuan yang terwujud dalam teknologi gampang digunakan untuk memaksakan sesuatu kepada masyarakat, karena dalam zaman

³⁵ Michel Foucault, *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santosa, (Yogyakarta: Narasi, 2017), 166.

³⁶ Alfathri Adlin, "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, *Parrhesia*", *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 1 No. 1, (2016), 21.

teknologi tinggi pun sebenarnya masih ada pemaksaan, maka akan sangat sulit lagi jika masuk dalam ruang kemajuan peradaban, tetapi yang terjadi adalah pergeseran instrumen yang dipakai untuk memaksa,³⁷ dan ini merupakan akibat dari suatu pengetahuan yang berusaha menguasai dengan menyingkirkan pengetahuan yang lain. Fenomena tersebut merupakan salah satu ciri penting operasional dari suatu pengetahuan, penyebarannya dan komsumsinya besar sekali (perluasannya relatif cepat dan tidak menemui pembatasan ketat), dan ini merupakan alat yang populer untuk konfrontasi sosial (perlawanan “ideologis”)³⁸. Disini kita menemukan adanya sebuah peperangan “karena kebenaran” atau minimal disekitar kebenaran, meskipun pada faktanya adalah perang mengenai status politik yang dimainkannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ Abdullah Khozin, “Konsep Kekuasaan Michel Foucault”, *Teosofi*, Vol. 2 No. 1, (2012), 142.

³⁸ Michel Foucault, *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santosa, (Yogyakarta: Narasi, 2017), 170.

BAB III

BIOGRAFI FELIX SIAUW DAN KHILAFAH DI MEDIA SOSIAL

Dalam bab tiga ini, penulis akan membahas tentang biografi Felix Siauw seorang kader eks-hti yang hingga kini tetap bergerak di ruang publik, lalu pembahasan selanjutnya kita akan melihat bagaimana metode dakwah di Indonesia mengalami pergeseran yang berpengaruh signifikan pada praktik keagamaan. Dalam pembahasan kali ini, penulis juga akan menunjukkan siapa generasi yang menjadi target utama dalam wacana *khilafah*, meskipun tidak keseluruhan sebuah generasi akan masuk dalam siklus perjuangan *khilafah* tetapi kita perlu mengetahui tipe individu dengan identitas keislaman yang kuat dan tidak terpengaruh dalam wacana *khilafah* yang muncul di ruang publik. Dan diakhir pembahasan penulis akan menyajikan isi konten media sosial Felix Siauw beserta beberapa catatan penulis atas isi konten tersebut.

A. Biografi Felix Siauw

Felix Yanwar Siauw atau yang biasa disapa Felix Siauw merupakan pendakwah yang aktif di media sosial, Felix lahir di Palembang pada bulan Januari 1984 dan nama Siauw Cen Kwok menjadi nama Tionghoanya yang disematkan kepadanya karena lahir dari keluarga Chinese. Ia sempat menjadi atheis karena agama yang dianutnya (katholik) tidak mampu memuaskan pikirannya, dia lalu mencari kebenaran dan hakikat hidup hingga akhirnya dia

memilih paham agnostik sejak dia kelas 3 SMP.¹ 5 tahun lamanya dia meyakini Tuhan tanpa beragama bahkan termasuk mengolok-olok agama, Felix akhirnya jatuh hati pada Islam setelah mengetahui Islam langsung dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan dia merasa akal nya terpuaskan dan hatinya terasa tenang oleh agama Islam.²

Felix memeluk agama Islam pada 10 Oktober 2002, selanjutnya dia belajar tentang agama Islam dari teman-temannya yang aktif sebagai aktivis eks-hti saat menjalani studinya di Institute Pertanian Bogor (IPB).³ Selain teman-temannya di kuliah Felix juga menyatakan bahwa dia mengenal Islam juga karena mengikuti kajian yang dipimpin oleh Fatih Karim, hingga berlanjut ke diskusi rutin serta membaca buku-buku yang semuanya merupakan buku kurikulum eks-hti yang digunakan untuk doktrinasi kepada anggota mereka. Fatih Karim juga sebenarnya adalah lulusan IPB yang telah bergabung lebih dulu dengan eks-hti sejak 1997.⁴ Dan pasca pertemuannya dengan anggota eks-eks-hti menjadikannya individu yang memiliki presepsi lebih banyak tentang Islam, ia meyakini bahwa agama Islam agama yang 'keren', meskipun awalnya Felix tidak langsung bergabung dengan organisasi eks-hti, tetapi intensitasnya bertemu dengan Fatih Karim membuatnya yakin untuk masuk dalam organisasi tersebut pada tahun 2006.

¹ Felix Y. Siauw, *Khilafah Remake*, (Jakarta: AlFatih Press, 2014), 110.

² *Ibid.*, 111.

³ Romario, "Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Ruang Media Sosial Instagram", *Jurnal Aqlam*, Vol. 4 No. 1, (2019), 31.

⁴ Muhammad As'ad, "Penetrasi Dakwah Islamisme Eks-HTI di Indonesia: Studi Netnografi Dakwah Felix Siauw & 'Yuk Ngaji' di Media Sosial", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vo. 11 No. 1. (2021), 38.

Setelah Felix bergabung dengan eks-hti dia menjadi salah satu kader terbaik yang dipercaya untuk melakukan *marketing*⁵ ideologi *khilafah*, Felix selalu diberi ruang oleh organisasinya untuk menjadi narasumber disetiap *event* kalangan anak muda. Felix pun pernah menjadi orator pada sebuah Rapat dan Pawai Akbar 1436 H yang diadakan oleh eks-hti di Gelora Bung Karno Jakarta yang bertajuk “Bersama Umat Tegakkan Khilafah”, bukan hanya itu, Felix pun pernah menjadi orator di beberapa gerakan mobilisasi massa seperti Aksi Bela Tauhid pada tahun 2018 akibat dari aksi pembakaran bendera eks-hti di Garut Jawa Barat. Diakui memang Felix merupakan salah satu kader terbaik eks-hti karena dia mampu menarik simpati dan merekrut anak muda khususnya Gen-Z. Dia sangat energik, kemampuan *public speaking* yang mudah menarik perhatian, dia pun mampu mengembalikan gairah perjuangan untuk mewujudkan *Khilafah Islamiyah*. Felix juga merupakan seorang motivator dan penulis,⁶ karyanya yang beredar luas dikalangan siswa dan mahasiswa sangat diminati karena dikemas dengan gaya bahasa, ilustrasi, serta idiom-idiom yang mudah dipahami.

Proyek bersama Felix dan eks-hti ini tidak bisa dianggap remeh, hal ini terbukti bahwa dari awal mereka juga bergerak menggunakan literatur keislaman, tidak hanya sebatas halaqoh. Buletin *Al-Islam*, *Al-Wa'ie*, dan tabloid Media Umat,⁷ sedangkan dalam dunia teknologi digital mereka memiliki situs *Fikr-Islam* (Pemikiran Islam), *Shahsyiyah Islamiyah* (Kepribadian Islam), dan *Nizam Al-*

⁵ Lintang Citra Christiani dan Prinisia Nurul Ikasari, “Generasi Z dan Pemeliharaan Relasi Antar Generasi dalam Perspektif Budaya Jawa”, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 4 No. 2, (2020), 39.

⁶ Manirul Ikhwan. dkk., *Literatur Keislaman Generasi Millennial*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press 2018), 84.

⁷ Romario, “Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Ruang Media Sosial Instagram”, *Jurnal Aqlam*, Vol. 4 No. 1, (2019), 30.

Islam (Sistem Islam). Terdapat website resmi milik eks-hti yakni hizbut-tahrir.or.id yang kini sudah diblokir oleh pemerintah sebagai langkah lanjutan dari proses pembubaran eks-hti dan Felix pun hingga kini juga masih menyebarkan paham *khilafah* melalui akun media sosialnya dan buku-buku yang ditulisnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Felix dipercaya untuk melakukan *marketing* ideologi. Salah satu keunggulan Felix adalah dia memiliki *skill marketing* dakwah yang jarang dimiliki oleh pendakwah Indonesia⁸ lainnya, *skill* tersebut dimiliki sejak dia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan yang dimiliki keluarganya pasca dia lulus. Pada tahun 2012 dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan fokus pada misi dakwahnya, yaitu menjalankan Islam yang *kaffah* demi tegaknya *Khilafah Islamiyah*. Secara eksplisit Felix menunjukkan garis ideologinya sebagai aktivis eks-hti, menurutnya *khilafah* merupakan sistem yang sah menurut Islam dan dia menegaskan bahwa *khilafah* merupakan satu-satunya tatanan sosial, politik, dan keagamaan yang dapat menjamin terselenggaranya Islam yang *kaffah*. Kemampuan yang dia miliki itulah yang kemudian dimaksimalkan sebagai strategi dakwahnya dalam menyampaikan *urgensi khilafah*. Dan ini merupakan bukti bahwa membubarkan eks-hti secara keorganisasian belum menjamin para simpatisan dan kadernya jera, tapi justru mereka lebih gencar melakukan doktrinasi ideologi melalui ruang publik yang erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi.

⁸ Muhammad As'ad, "Penetrasi Dakwah Islamisme Eks-HTI di Indonesia: Studi Netnografi Dakwah Felix Siauw & 'Yuk Ngaji' di Media Sosial", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 11 No. 1, (2021), 39.

B. Media Sosial Sebagai Media Dakwah

Dua dekade terakhir ini, keislaman di Indonesia terjadi perubahan menuju otoritas keagamaan baru yang berkontestasi dan menyaingi otoritas keagamaan lama melalui platform media online, salah satunya bidang dakwah. Seiring dengan perkembangan zaman, proses dakwah pun mengalami perubahan metode atau cara, perubahan tersebut bisa dilihat dari beberapa aplikasi media sosial seperti *twitter, line, facebook, instagram, dan youtube*, yang dimanfaatkan sedemikian rupa sebagai media menyampaikan dakwah.⁹ Perubahan ini dinikmati oleh seluruh manusia tak terkecuali umat Islam, bahkan kelompok-kelompok islamis pun berlomba-lomba untuk menampilkan wacana keislaman dan aktor-aktor yang baru untuk memenangkan opini publik melalui platform yang tersedia. Para dai baru-baru pun muncul dan menjadi terkenal, strategi marketing menjadi salah satu strategi yang bisa membuat pemaparan isi dakwah keagamaan menjadi lebih menarik, mudah dipahami serta mudah diakses oleh semua kalangan. Gerakan ini dilahirkan oleh Islamisme di Indonesia yang sudah ada sejak lama, Islamisme didefinisikan sebagai komitmen umat Islam kepada tindakan politik untuk melaksanakan apa yang mereka anggap sebagai agenda Islam, salah satu kelompok Islam yang masuk dalam definisi diatas adalah eks-Hizbut Tahrir Indonesia.¹⁰

Jika pada masa Orde Baru pemerintah ikut mengontrol ketat aktivitas dan diskursus keagamaan Islam yang beredar luas di masyarakat, maka di era

⁹ Nor Latifah dan Romario, "Trendsetter Muballigh di Medsos: Analisis Framing Instagram Felix Siau dan Hanan Attaki", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 1, (2019), 40.

¹⁰ Muhammad As'ad, "Penetrasi Dakwah Islamisme Eks-HTI di Indonesia: Studi Netnografi Dakwah Felix Siau & "Yuk Ngaji" di Media Sosial", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 11 No. 1, (2021), 34.

Reformasi wacana keagamaan tumbuh subur disetiap sudut ruang publik tanpa adanya intervensi dari negara karena itu merupakan konsekuensi Demokratisasi yang sedang berjalan. Perubahan era Orde Baru ke era Reformasi membawa perubahan untuk mereduksi “panggung negara” dan menguatkan peran “panggung jalanan” yang menampilkan ruang diskursus baru di masyarakat.¹¹ Sesuatu yang paling menonjol dalam perjalanan demokratis Indonesia adalah terjadi revitalisasi ruang publik, media komunikasi memiliki kontribusi besar dalam membentuk dan merevitalisasi ruang publik sebagai ruang untuk memunculkan wacana keagamaan baru yang tanpa memandang latarbelakang pendidikan, politik, dan profesi. Setiap orang bisa memanfaatkan berbagai macam postingan foto, video, dan kata-kata motivasi, dari proses dan fenomena seperti inilah kemudian memunculkan ustaz atau dai hits yang lahir dari media sosial, beberapa diantaranya adalah Felix Siauww karena cetusan tagarnya #UdahPutusinAja, Muzammil Hasballah yang terkenal berkat unggahan video saat menjadi imam sholat di ITB,¹² serta Hanan Attaki yang dianggap sebagai dai *good looking*.

Aktor atau produsen atas wacana keagamaan yang ada di ruang publik media sosial saat ini pada umumnya didominasi oleh apa yang disebut ‘santri baru’, mereka adalah kalangan terpelajar baru yang ‘tidak murni’ mempresentasikan tradisi keilmuan pesantren tradisional. Mereka datang bukan tanpa sebab, mereka bekerja dalam area proyek intelektual¹³ untuk mensukseskan

¹¹ Manirul Ikhwan. dkk., *Literatur Keislaman Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), 64.

¹² Nor Latifah dan Romario, “Trendsetter Muballigh di Medsos: Analisis Framing Instagram Felix Siauww dan Hanan Attaki”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 1, (2019), 36.

¹³ Manirul Ikhwan. dkk., *Literatur Keislaman Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), 71.

wacana keislaman yang diyakininya, misalnya “hijrah”. Media sosial telah menjadi ruang publik Islam, meningkatnya pendakwah baru di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial telah memperluas ruang publik Islam untuk menyampaikan gagasan, wacana, dan menampakkan identitas keislamannya.

Wacana Islamisme yang muncul disebut sebagai ekspresi “politik Islam”, memang benar jika tidak semua wacana atau narasi serta gagasan yang muncul tidak inheren merupakan aksi politik,¹⁴ seperti pembahasan tentang pakaian perempuan muslim, motivasi keislaman, hingga panduan bagi muda-mudi tidak secara eksplisit memuat aksi politik. Namun, wacana keislaman dapat dikategorikan sebagai “politik Islam”, karena wacana atau gagasan tersebut ditransformasikan ke dalam simbol keagamaan publik. Bahkan jika ditelusuri lebih dalam lagi, muncul di ruang media sosial akun-akun tentang kesalahan seperti menjadi perempuan yang shaleha, tentang ta’aruf, hingga pemakaian hijab. Selain itu akun-akun di media sosial juga banyak yang memposting foto atau video tentang seorang muslimah yang tengah menghindari pacaran, tips melakukan ‘hijrah’ yang benar bagi seorang muslimah, pemakaian hijab yang syar’i, hingga membangun *image* bagaimana menjadi insan yang shaleh-shaleha.

Mengapa harus berdakwah melalui teknologi digital? berdasarkan hasil riset *Hootsuite* dan *We Are Social* pada tahun 2020, dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 274,9 juta, sebanyak 73,7% dari jumlah tersebut atau lebih dari 200 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Sedangkan dari angka 200 juta itu, 170 juta merupakan pengguna media sosial. Besarnya jumlah

¹⁴ Manirul Ikhwan. dkk., *Literatur Keislaman Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), 75.

masyarakat yang mengakses internet utamanya media sosial, mengakibatkan terjadinya transformasi media dakwah yang tentunya memberikan kesempatan siapapun yang bergerak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan agama untuk mempromosikan produk atau ideologinya di dunia digital.¹⁵

Atas dasar kebebasan tanpa memandang latarbelakang pendidikan, politik, dan profesi dalam menyampaikan wacana keagamaan (Islam) menimbulkan pergeseran otoritas atas nama agama yang biasanya dipegang oleh ulama arus utama kini beralih¹⁶ ke para dai baru yang dianggap ulama hanya karena keaktifannya bermedia sosial seperti beberapa nama yang disebutkan sebelumnya, apalagi pengguna media sosial mayoritas mengikuti akun seseorang yang menjadi *public figure*, fenomena tersebut akhirnya memunculkan kontestasi wacana keislaman antara ulama atau kyai dengan para dai yang baru-baru ini muncul di ruang media sosial. Inilah yang disebut arena ‘tarung bebas’ untuk memenangkan opini publik agar mendapatkan kepercayaan umat.

C. Mengenal Generasi Z

Dalam dua dasawarsa kini produksi wacana keislaman telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, wacana dan ideologi Islamis dikemas sedemikian rupa agar efektif untuk memasuki alam pikir pembaca masa kini, terutama anak muda. Perhatian terhadap anak muda dilatarbelakangi oleh fakta bahwa masa muda adalah masa pencarian jati diri, banyak yang menyatakan

¹⁵ Muhammad As’ad, “Penetrasi Dakwah Islamisme Eks-HTI di Indonesia: Studi Netnografi Dakwah Felix Siauw & “Yuk Ngaji” di Media Sosial”, *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 11 No. 01, (2021), 42.

¹⁶ Nor Latifah dan Romario, “Trendsetter Mubaligh di Medsos: Analisis Framing Instagram Felix Siauw dan Hanan Attaki”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, (2019), 37.

bahwa anak muda adalah penerus masa depan bangsa, dan dianggap sebagai pihak yang paling rentan terhadap penyelewengan dan radikalisme. Hal ini dikarenakan anak muda hidup dalam masa transisi antara anak-anak (*childhood*) yang tidak memiliki beban tanggungjawab apapun dan masa dewasa (*adulthood*) yang ditandai dengan adanya tanggungjawab penuh terhadap kehidupannya. Akibatnya anak muda seringkali dianggap sebagai pihak yang paling rentan terimbas ‘kepanikan moral’, sehingga secara aktif mereka mencari jalan keluar dan mencari rujukan diantaranya dengan mengkonsumsi literatur keislaman yang menawarkan solusi bagi masalah moralitas dalam menjalani hidup.¹⁷

Generasi Z atau Gen-Z adalah individu yang lahir setelah tahun 1995¹⁸, dalam teori generasi dirumuskan seperti ini: *great generation* (1901-1927); *silent generation* (1928-1945); *baby boomer* (1946-1963); Generasi X (1964-1979); Generasi Y atau Millennial (1980-1994); dan Generasi Z (1995-2010). Sebelumnya kita mungkin hanya mengenal generasi tua dan generasi muda yang hanya di dasari pada tahun kelairan dan pengalaman senasib, tetapi kini generasi telah berkembang menjadi kategori, teori generasi seperti diatas telah ditentukan beberapa indikator diantaranya; berdasarkan kemajuan teknologi, tenaga kerja, dan perkembangan budaya sosial.¹⁹ Mengenai kualifikasi Gen-Z memang terdapat perbedaan, karena ada yang menyatakan bahwa mereka yang lahir dari tahun 1980-2000 adalah generasi Y / Millennial, sedangkan Gen-Z merupakan

¹⁷ Manirul Ikhwan. dkk., *Literatur Keislaman Generasi Millennial*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), 66.

¹⁸ Rina Sari Qurniawati dan Yulfan Arif Nurohman, “eWOM Pada Generasi Z di Sosial Media”, *Daya Saing: Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 20 No. 2, (2018), 72.

¹⁹ Adhika Tri Subowo, “Membangun Spiritualitas Digital Bagi Generasi Z”, *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 5 No. 2, (2021), 382.

mereka yang lahir setelah tahun 2001. Tetapi menurut Bruce Tulgan pembagian seperti ini tidak bisa diterima disebabkan dua faktor; a) pembagian waktu yang seperti itu memuat jangkauan waktu yang terlalu panjang yang artinya menyatukan mereka yang berusia 20 tahun dengan 40 tahun dalam klasifikasi generasi yang sama; b) perkembangan teknologi juga tidak bisa disatukan karena sebagian besar tahun 1900- an adalah pra-internet,²⁰ sehingga pada tahun 1980-2000 memuat dua revolusi teknologi informasi. Oleh karena itu penulis menggunakan klasifikasi sebagaimana dipakai oleh White, yakni Gen-Z adalah mereka yang terlahir pada tahun 1995-2010, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Gen-Z merupakan generasi pertama yang dilahirkan ke dalam kehidupan dimana teknologi *mobile* ada dimana-mana, generasi-Z atau penduduk asli era digital lahir di dunia dengan kondisi teknologi serba ada, mulai PC, ponsel, perangkat gaming, dan internet. Gen-Z pada umumnya lebih senang tinggal dalam ruangan untuk mengakses internet dan bermain *game online* daripada keluar rumah atau bermain diluar ruangan, bahkan mereka mencari pengalaman melalui internet tanpa kendala apapun pada salurannya.²¹ Sebab itulah pendapat populer tentang Gen-Z percaya bahwa mereka sangat paham dengan teknologi (bahkan lebih paham daripada Millennial), karena Gen-Z tidak pernah mengenal dunia tanpa *smartphone* atau media sosial, dan mereka tidak hanya nyaman dengan teknologi melainkan sudah ada dilevel ketergantungan.

²⁰ Adhika Tri Subowo, "Membangun Spiritualitas Digital Bagi Generasi Z", *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 5 No. 2, (2021), 383.

²¹ Rina Sari Qurniawati dan Yulfan Arif Nurohman, "eWOM Pada Generasi Z di Sosial Media", *Daya Saing: Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 20 No. 2, (2018), 70.

Bersamaan dengan bangkitnya Gen-Z terjadi banyak perubahan besar, salah satunya adalah pilihan komunikasi Gen-Z yang cenderung menggunakan *FaceTime* atau aplikasi panggilan video dan ketika telah melakukan panggilan video mereka menganggap telah melakukan komunikasi tatap muka.²² Hal ini berimbas kepada keterampilan dan gaya komunikasi Gen-Z dalam melakukan kontak sosial dengan berkomunikasi secara *Face to Face* karena mereka sudah terbiasa dengan sesuatu yang serba instan. Sedangkan gaya komunikasi menentukan bagaimana seorang individu mempersepsi peran dirinya, membangun relasi dengan orang lain, serta menentukan efektivitas sebuah komunikasi, bahkan gaya komunikasi seringkali lebih penting daripada konten informasi yang akan disampaikan.²³

Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah semua usia dalam kelompok generasi-Z memiliki identitas, perilaku dan kebiasaan yang sama atau ada kelompok dengan identitas keislaman yang berbeda?. Ini menarik, jika membahas tipologi identitas keislaman yang ada di Indonesia karena sangat variatif, penulis menemukan tiga tipe kelompok Islam yang kini populer dan berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat muslim dan dijadikan sebagai upaya pembentukan identitas diri. Yang *pertama*, ada kelompok Modernitas, kelompok ini mengajukan ide perpaduan Islam dan modernitas. Kelompok ini tumbuh sebagai kelompok yang ingin menunjukkan identitas Islamnya namun juga membutuhkan pengakuan sebagai kelompok modern yang mampu beradaptasi dengan dinamika

²² Lintang Citra Christiani dan Prinisia Nurul Ikasari, "Generasi Z dan Pemeliharaan Relasi Antar Generasi dalam Perspektif Budaya Jawa", *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 4 No. 2, (2020), 36.

²³ *Ibid.*, 37.

masyarakat dan peka terhadap perkembangan global. Ciri kelompok ini adalah senantiasa memproduksi komoditas barang dan ritual secara komersil dan komunal, contohnya berbagai barang yang berlabel syariah atau halal, misalnya bank syariah, asuransi syariah, kosmetik halal, hijab dan pakaian syar'i, dan sebagainya.²⁴

Kedua, ada kelompok Puritanisme. Mereka memosisikan Islam sebagai ajaran yang baku, tidak berubah, dan kekal, jadi bangunan hukum dan ajarannya harus merujuk pada teks yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kelompok ini juga menilai bahwa adat, tradisi, dan budaya lokal termasuk juga 'selamatan' dan yasin tahlil dipandang sebagai sesuatu yang bid'ah dan *khurafat*, ini yang kemudian mereka dikenal sebagai kelompok yang tidak mempertimbangkan asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Kelompok ini menginginkan formalisasi syariat Islam dalam sistem hukum negara Indonesia atau dalam cakupan yang lebih jauh menginginkan Indonesia menjadi negara Islam,²⁵ karena bagi mereka Islam harus dimaknai secara totalitas sehingga perlu direalisasikan pengislaman terhadap seluruh sistem hidup, negara, masyarakat, lengkap dengan bentuk dan simbolnya²⁶ dan mereka memiliki klaim bahwa ajarannya adalah representasi Islam yang murni.

Ketiga, yaitu Tradisionalisme, kelompok ini merupakan kelompok Islam yang mengkombinasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai adat kedaerahan, menurut

²⁴ Qorry 'Aina, "Membaca Kelas Menengah Muslim Indonesia", *Jurnal Politik*, Vol. 3 No. 2, (2018), 327.

²⁵ Ibid., 328.

²⁶ Umma Farida, "Islam Pribumi dan Islam Puritan: Ikeks-eks-htiar Menemukan Wajah Islam Indonesia Berdasar Proses Dialektika Pemeluknya dan Tradisi Lokal, *Jurnal Fikrah*, Vol. 3 No. 1, (2015), 147.

etimologi tradisionalisme merupakan ajaran atau paham yang berdasarkan tradisi yang ditransmisikan dari generasi ke generasi berikutnya, tradisionalisme merupakan kontra gerakan dari modernitas²⁷ (yang mudah melupakan tradisi) dan puritanisme (yang tidak menghargai budaya lokal). Ciri identitas kaum tradisional pada umumnya mereka berakar dari lingkungan pondok pesantren dan yang belajar pesantren disebut santri, mereka belajar ilmu fiqh, nahwu-sharaf, kitab kuning, ushuluddin, teologi, tasawuf, dan tafsir. Reaksi konstruksi antara ajaran Islam dan budaya lokal Indonesia ini berjalan dengan natural tanpa ada paksaan dari luar dan keduanya berinteraksi secara terbuka sehingga melahirkan intelektualitas baru dengan corak asimilasi budaya yang bisa dipahami tidak hanya dari kalangan tradisional saja,²⁸ Oleh karena itu peran kebudayaan pesantren berkonsentrasi pada tradisi budaya lokal dan dikulturasikan kedalam ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, ini yang khas dari dunia pesantren.

Dari tiga macam identitas keislaman tersebut, terdapat kesimpulan bahwa kelompok Tradisionalisme merupakan kelompok yang paling sulit untuk disusupi wacana *khilafah*. Kelompok Modernisme dan Puritanisme merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap wacana keislaman yang ada di dunia digital yang kini tengah diisi oleh para muballigh atau dai yang masih tidak memiliki otoritas keagamaan. Dua kelompok ini menurut penulis sangat rentan menjadi target dari wacana *khilafah* yang muncul di ruang publik, hal ini dikarenakan sebuah

²⁷ Asep Mulyaden, "Ideologi Islam Tradisionalis Dalam Tafsir", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1 No. 2, (2021), 189.

²⁸ Ahmad Ali Riyadi, "Gerakan Post-Tradisionalisme Islam", *Jurnal Al-Fikra*, Vol. 2 No. 2, (2003), 115.

identitas diri yang lemah dari kelompok modernisme dan identitas diri yang bersebrangan dari tradisi lokal yang berlaku.

Tradisionalisme memiliki identitas yang melekat yaitu pesantren dan santri, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki fungsi mencetak generasi muslim yang berilmu serta bisa membimbing masyarakat,²⁹ sedangkan santri adalah sebutan untuk siapa saja yang telah memilih lembaga pondok pesantren sebagai tempat menuntut ilmu.³⁰ Hal yang paling menjadi pembeda antara santri dan non-santri adalah tingkat psiko-spiritual yang ditandai dengan kemampuan dalam menerima berbagai kenyataan dengan tenang dan terkendali, bahkan santri yang belajar di pesantren memiliki karakter mudah beradaptasi, *luwes* dalam bergaul dengan tetap menjaga identitas diri. Santri juga memiliki konsep diri yang kuat, mulai dari kepribadian, sosial, moral, fisik, dan akademik. Kaum santri lebih cenderung berperilaku peka terhadap lingkungan sosial serta lingkungan hidup sekitarnya, dan hal yang bisa kita lihat secara jelas untuk menilai kaum santri adalah kepuasan hidupnya sangatlah sederhana.³¹

Maka dari itu seiring dengan kemajuan teknologi membuat individu lebih asik bermain gadget dan tidak memiliki komunikasi sosial dengan lingkungan sekitar (kondisi yang sangat beda di lingkungan pesantren), lebih jauh lagi atas dasar ilmu agama yang didapat dari internet yang belum jelas kebenarannya bisa menjadikan individu diusia muda sudah terpapar pemahaman radikalisme yang berujung tindakan terorisme. Ini yang kemudian menjadikan pesantren diyakini

²⁹ Suwarno, "Pondok Pesantren Dan Pembentukan Karakter Santri", *Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, Vol. 2 No. 1, (2017), 81.

³⁰ Muhammad Ahsan Jauhari, "Perilaku Sosial Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Kota Kediri", *Spiritualita*, Vol. 7 No. 1, (2017), 7.

³¹ Fuad Nashori, "Kekuatan Karakter Santri", *Millah*, Vol. 11 No. 1, (2011), 205.

mampu membentuk kepribadian yang lebih kuat secara ilmu keagamaan dan ilmu sosial. Bahkan di lingkungan pesantren juga memiliki nilai nasionalisme yang sangat kuat, para santri diajarkan betapa pentingnya menjaga sebuah negara dari perpecahan akibat gerakan-gerakan yang bertujuan mengganti sistem kenegaraan Indonesia.

D. Aktivisme Felix di Ruang Media Sosial

Felix memanfaatkan media sosial untuk melakukan gerakan dakwahnya untuk menyampaikan pemahaman ideologi yang dianutnya. Selaras dengan fenomena di era sosial media kini, sangat banyak dai yang menggunakan media sosial untuk menjangkau audiens yang menjadi sasaran wacananya. Sebelum itu kita perlu mengetahui beberapa macam aplikasi media sosial antara lain, *YouTube*, *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Line*, *Telegram*, dan *TikTok*.³² Aplikasi-aplikasi tersebut mayoritas diunduh melalui *gadget* untuk berselancar informasi di media sosial sekaligus sebagai media komunikasi virtual atau online. Dalam pembahasan ini penulis memilih *Instagram*, *Twitter* dan *YouTube* Felix Siauw untuk melihat aktivisme Felix di media sosial. Dalam tiga aplikasi tersebut Felix memanfaatkannya dengan mengunggah gambar, video, dan infografis dalam rangka terus bergerak untuk menyampaikan gagasannya tentang *Khilafah Islamiyah*.

Di Indonesia tercatat jumlah pengguna *Instagram* hingga Juli 2021 sebesar 91,77 juta pengguna dan menempati posisi keempat dalam 10 negara dengan

³² “14 Macam Media Sosial yang Sering Digunakan, Beserta Penjelasannya” dalam <https://m.liputan6.com/hot/read/4645781/Diakses> 13 Oktober 2021.

pengguna Instagram terbanyak, pengguna terbesarnya terdapat dikelompok usia 18 – 24 tahun yaitu 36,4%.³³ Sedangkan pengguna *Twitter* di Indonesia sampai bulan Januari 2021 mencapai 14,05 juta,³⁴ dan pada bulan Februari 2021 Data Reportal merilis laporan berjudul *Digital 2021* yang berisi statistik internet terbaru dari berbagai negara termasuk Indonesia, tercatat bahwa *YouTube* menjadi sosial media yang paling banyak digunakan oleh *user* Indonesia yakni sebanyak 93,8% dari 170 juta atau setara dengan 159,46 juta *user* Indonesia.³⁵ Melihat dari data tersebut sangat wajar jika Indonesia menjadi lahan subur bagi kelompok yang ingin merealisasikan proyek ideologinya yang bersebrangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

1. Twitter Felix Siauw

Dalam cara penguanaannya twitter mampu memuat 50 ribu lebih tweet yang di posting oleh penggunanya, ini menjadi fitur penunjang bagi pembuatan sebuah narasi atau gagasan yang mampu dijelaskan secara utuh dan komperhensif baik secara tulisan, foto, maupun video. Felix pun dalam akun pribadinya juga seringkali membuat sebuah utas (tulisan berlanjut) dalam twitternya, tidak jarang dia memposting sebuah narasi tentang pentingnya syariah yang *kaffah* dalam kehidupan manusia, berbagi tautan link akun medsos lain miliknya, hingga

³³ “Inilah Negara Pengguna Instagram Terbanyak, Indonesia Urutan Berapa?” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/03/Diakses> 13 Oktober 2021.

³⁴ “Siapa Tokoh Terpopuler di Twitter Pada 2021?” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/09/Diakses> 13 Oktober 2021.

³⁵ “Mantap Hampir Seluruh Netizen Indonesia Pengguna Youtube” dalam <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/07/05/Diakses> 13 Oktober 2021.

memberikan *counter* pada kebijakan pemerintah yang diarahkan kepada sebuah delegitimasi. Berikut beberapa cuitan Felix di akun miliknya:



Gambar 1 dan 2: tweet oleh akun @felixsiauw

Gambar 1 dan 2 berisi tentang karakter pemimpin tegas adalah hasil dari syariat, indikatornya adalah kebijakan yang diambil senantiasa bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.



Gambar 3 dan 4: tweet oleh akun @felixsiauw

Pada gambar 3, dia mengkritik kebijakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang dinilai gagal mengakomodir ibadah haji umat muslim, dan menganggap minim ilmu jika membahas *khilafah*.

Gambar 4, terdapat link Ngaji Jomblo, ini salah satu cara mendapatkan simpati anak muda untuk belajar lebih dalam tentang Islam yang syar'i, dan merupakan strategi *marketing* dakwahnya agar segala akun media sosialnya secara rutin dikonsumsi. Dan ini akan berlanjut pada proses pengkaderan pemikiran *khilafah*.

2. Instagram Felix Siauw

Instagram pada dasarnya juga memiliki fitur yang hampir mirip dengan twitter, perbedaannya berada dalam fitur editor dan *custom* kontennya. Dalam instagram pemilik akun bisa membuat langsung konten yang mereka inginkan tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Felix pun memiliki akun media sosial ini, beberapa konten yang dia posting berisi tentang dialog dengan narasumber lain atau dengan teman sepemahaman, dalam kontennya Felix sering mengangkat tema yang sedang *booming* atau yang berkaitan dengan Islam. Tidak jarang dalam isi kontennya dia tidak lagi berdialog, tetapi sudah masuk dalam ranah penggiringan opini publik sekaligus membangun wacana tentang bagaimana kondisi negara Indonesia terkini yang penuh dengan permasalahan, menurutnya ini disebabkan negara berdiri tanpa hukum-hukum Islam. Felix juga tidak takut untuk memojokkan gagasan pada kaum moderat yang berusaha membuat gerakan diluar *khilafah*.



Gambar 5 dan 6: Cuitan oleh akun @felixsiauw

Gambar 5 merupakan *Instagram* Felix dengan judul “Kafir Atau Non-Muslim” yang diunggah pada tanggal 5 Maret 2019 berupa video yang berisi obrolan tentang beberapa kebijakan dan keputusan dari salah satu ormas.

Gambar 6 juga video yang di posting Felix melalui *Instagramnya* yang diunggah pada 18 Juli 2018 dengan judul “Tentang Islam Nusantara”.

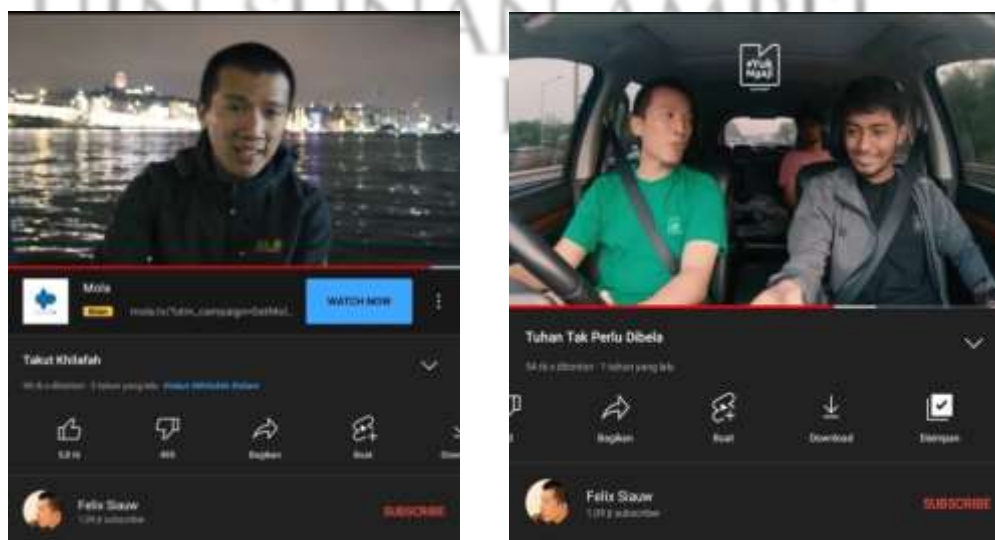


Gambar 7: Cuitan oleh akun @felixsiauw

Pada gambar 7 juga merupakan postingan Felix yang diunggah pada tanggal 9 Agustus 2019 yang berupa video dengan judul “Ijtima Ulama IV: #KhilafahWajib”, berisi penjelasan tentang fase-fase era yang ada dalam kehidupan manusia, dalam postingan yang sama Felix menulis narasi atau *caption* yang menjelaskan hasil Ijtima Ulama IV yang sepakat bahwa penerapan syariah dan penegakan *khilafah* sebagai kewajiban agama Islam.

3. Konten Youtube Felix Siauw

Youtube merupakan sebuah situs web berbagi video, situs ini memungkinkan penggunanya mengunggah, menonton, dan berbagi video. Di dalamnya mampu untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/konten kreator, termasuk juga klip TV, video musik, blog video, dan video orisinal pendek. Berikut konten yang sedang menyebarkan misi *khilafah* dalam konten Youtube miliknya.



Gambar 8 dan 9: konten Youtube @felixsiauw

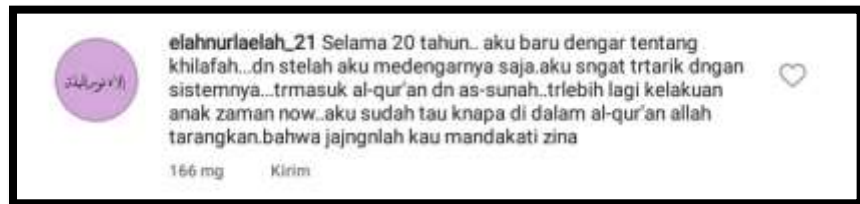
Pada gambar 8 konten tersebut berisi tentang penjelasan bahwa ketakutan terhadap *khilafah* itu sesuatu yang dibuat-buat (*setting*) oleh rezim penguasa dan kelompok anti *khilafah*. Ketakutan ini dianggap sebagai cara rezim penguasa agar masyarakat turut serta dalam penolakan wacana atau ide penegakkan *khilafah*, ketakutan ini dinilai Felix sebuah ketidaktahuan dari masyarakat tentang *khilafah* yang dimanfaatkan oleh rezim penguasa. Dalam kontennya Felix mengajak umat muslim untuk *flashback* di masa kejayaan Islam yang hanya terjadi pada masa Rasulullah, Sahabat, dan dinasti Umayyah hingga Utsmaniyah.

Dalam gambar 9 Felix sama sekali tidak menyinggung *khilafah*, tetapi penulis menyoroti narasi Felix yang dianggap keluar dari konsep dasar akidah. Menurut penulis ini perlu disajikan untuk menakar, Felix memiliki kualitas agama atau memang sekedar pengiat media sosial yang bicara agama. Judul kontennya adalah “Tuhan Tak Perlu Dibela”, sama persis dengan tulisan Gus Dur. Dalam kontennya Felix mengkritik cara pandang Gus Dur dan Felix membuat analogi yang fatal secara konsep akidah Islam, dalam dialognya Felix mengatakan:

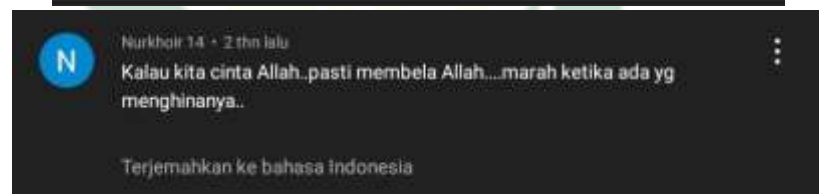
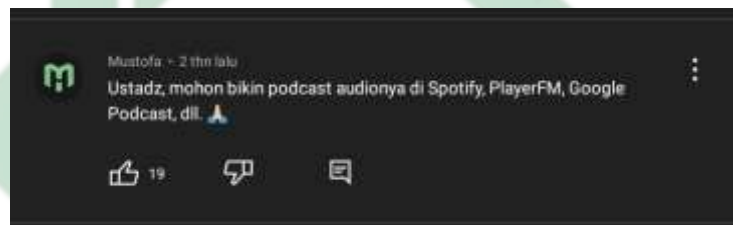
“jika kita bicara tentang agama sama, ibu antum dicaci maki aja antum gak terima, masa tuhan dicaci maki antum terima? Kan enggak toh, kalau ada orang bilang tuhan tidak perlu dibela saya jadi berpikir jangan-jangan orang ini gak pernah mencintai”.

4. Komentor Postingan

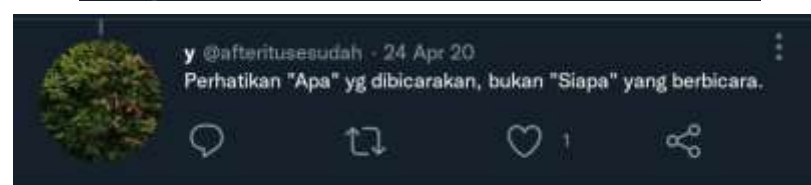
Menurut penulis komentar postingan perlu untuk ditampilkan sebagai bukti bahwa teori kuasa-pengetahuan beroperasi dalam media sosial Felix Siauw serta mendapat dukungan dan respon dari para *followers* media sosialnya. Tetapi dapat diakui pula bahwa di dalam komentar Felix Siauw juga ada yang menyatakan ketidaksepakatannya terhadap gagasan *khilafah* ala eks-HTI.



Gambar 10 dan 11: komentar *Instagram* @felixsiauw



Gambar 12 dan 13: komentar *Youtube* @felixsiauw



Gambar 14 dan 15: komentar *Twitter* @felixsiauw

Ketiga aplikasi diatas menjadi ruang terbuka bagi Felix untuk tetap menyebarkan *khilafah* ala eks-eks-hti yang kini telah dibubarkan, di sisi lain Felix merupakan individu yang memiliki skill *marketing* yang sangat bagus, maka tidak heran jika dia dijuluki motivator keagamaan pada ruang media sosial. Hal ini disebabkan dia mampu menjalankan akun miliknya dengan intelektualitas serta pemahamannya yang mampu memikat para penontonnya. Dari beberapa konten dan narasi yang sudah ditampilkan diatas ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, *pertama*, bahwa Felix masih konsisten menjadikan pemerintah sebagai bahan kontennya, benar atau salah suatu kebijakan pemerintah bagi Felix pemerintah harus selalu disalahkan serta melekatkan kata *dzalim* pada pemerintah. Ini digunakan untuk menjadikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun, dan ini sangat berbahaya bagi stabilitas nasional sebuah negara. *Kedua*, Felix tidak menerima pluralitas keberagaman di Indonesia, dia tidak mengakui ada kaitan erat antara budaya dan agama, terbukti dari isi konten gambar 1 dan 2. Tidak hanya itu, Felix pun tidak memberikan solusi bagi non-muslim jika Indonesia dijadikan negara Islam, justru Felix terkesan memaksa agar non-muslim menerima konsekuensi atas penggunaan syariat Islam dalam hukum kenegaraan.³⁶

Ketiga, Felix meyakini anak muda yang sedang mencari jati diri atau identitas keislaman merupakan kelompok yang paling mudah untuk direkrut. Itu terlihat dari cara Felix yang menjadikan *trend* dan *problem* anak muda sebagai isi dakwah, Felix menawarkan gagasan atas *trend* dan *problem* kehidupan anak muda yang dikemas atas nama syariat Islam. *Keempat*, Felix membuat analogi yang fatal, pada gambar 9 jelas ada upaya untuk menyamakan Sang Pencipta dengan yang diciptakan. Ini sebuah kekeliruan dalam ruang akidah, karena sifat *mukhalafahu lillahwadits* sudah mutlak. Sifat tersebut menjelaskan bahwa Allah berbeda dengan segala ciptaan-Nya, wajib hukumnya menafikan daripada Allah

³⁶ Felix Y. Siauw, *Khilafah Remake*, (Jakarta: AlFatih Press, 2014), 285.

yang menyerupai-Nya dari segala yang baru, dan ini wajib hukumnya untuk diyakini oleh seorang muslim.³⁷

Kelima, pada gambar 9, sebenarnya Gus Dur ingin menegaskan bahwa beragama harus mengedepankan rasa toleransi dan tidak merendahkan agama lain. Dalam artikelnya pun Gus Dur menyampaikan bahwa “apapun penilaian manusia atas Allah, sama sekali tidak mempengaruhi Kebesaran dan Keagungan-Nya di alam semesta”,³⁸ ini ajaran tasawuf yang terkenal sebagai jalan mengenal Allah.³⁹ Maka penting untuk ditegaskan bahwa Felix tidak memiliki keilmuan di bidang tasawuf.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ Pirhat Abbas, “Paham Keagamaan H. Abdul Jalil bin H. Demang: Analisis Kitab *Minhaj al-Umniyah fi Bayani ‘Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah*”, *Kontekstualita*, Vol. 25 No. 1, (2010), 148.

³⁸ “Review Buku Gus Dur Tuhan Tidak Perlu Dibela” dalam <https://tugujatim.id/Diakses> 22 Oktober 2021.

³⁹ Burhanudin Banda Cut, “Tauhid Dalam Konsepsi Abdurrauf”, *Substantia*, Vol. 13 No. 2, (2011), 178.

BAB IV
MEMBONGKAR *KHILAFAHISME* FELIX DI MEDIA SOSIAL
MENURUT MICHEL FOUCAULT

Pada bab ini penulis akan membahas di awal tentang bias media yang menjadikannya sebagai ruang bebas untuk menjalankan pengideologisasian yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, penulis akan membongkar apa yang sedang dijalankan oleh Felix Siau (seorang kader eks-HTI) di ruang media sosial, dia memiliki beberapa aplikasi yang aktif (*Instagram, Twitter, dan Youtube*) dan setiap hari digunakan untuk menyebarkan narasi dan wacana tentang *khilafah*. Dalam proses pembongkaran misi Felix, penulis menggunakan teori Michel Foucault yakni relasi kuasa-pengetahuan. Dan bab ini akan diakhiri dengan sebuah kontra narasi yang diambil dari sudut pandang Islam moderat.

Sekilas tentang bias media menarik untuk diulas, media sosial menjadi salah satu alat untuk menyampaikan berita, informasi, gambaran umum, dan penilaian tentang banyak hal, ia mempunyai peran untuk membentuk opini publik karena media juga bisa berkembang menjadi media penekan atas sebuah ide atau gagasan, hingga sebuah kepentingan. Pada dasarnya bias media terjadi karena ia tidak berada di ruang yang vakum, media berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, dan konflik. Dalam pengertian lain, media sosial dapat memberikan pengaruh “positif” maupun “negatif”, dan atribut yang dipakai bersifat sangat relatif, tergantung pada dimensi kepentingan yang diwakili.

Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang di mana berbagai ideologi bisa direpresentasikan dan disebarluaskan, ini berarti pada satu sisi media sosial bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, dan kontrol atas wacana publik. Sedangkan di sisi yang lain, media sosial juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.¹ Fungsi lain dari sebuah media adalah sebagai mekanisme integrasi sosial, ini berfungsi untuk menjaga dan mengontrol nilai-nilai kelompok dijalankan. Untuk mengintegrasikan masyarakat dalam tata nilai yang sama maka pandangan dan nilai harus mampu didefinisikan sehingga dapat diterima dan diyakini kebenarannya. Dari sini media membuat sebuah kelompok nilai yang benar dan yang menyimpang, jadi semua pandangan tersebut tidak berjalan alami, melainkan dikonstruksi. Melalui konstruksi tersebut media sosial secara aktif mendefinisikan sebuah peristiwa, dan realitas sehingga membentuk apa yang layak, yang sesuai, dan apa yang dipandang menyimpang.²

Sedangkan menurut Al-Zastrouw, meskipun media mengandung bias, namun derajatnya berbeda-beda. Ada berita yang biasanya sangat rendah sehingga cenderung objektif, ada yang biasanya sangat tinggi sehingga yang disajikan justru berbeda jauh atau bersebrangan dari fakta sebenarnya. Sesuatu yang disajikan di media pasti akan menggunakan bahasa, dan bahasa bukanlah sesuatu yang bebas nilai, bahasa tidak netral, dan uniknya tidak sepenuhnya dalam kontrol kesadaran. Menurutnya tingkat bias ini dipengaruhi oleh tiga hal: kapasitas dan kualitas

¹ Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 30.

² Eriyanto, *Analisis Framing*, (Yogyakarta: Lkis, 2018), 145.

pengelola media, kuatnya kepentingan yang bermain dalam realitas sosial, serta taraf kekritisannya masyarakat.³

A. Membongkar Misi *Khilafahisme* Felix Siauw

Felix merupakan mantan kader eks-HTI yang hingga kini tetap eksis di dunia dakwah Islam dan dunia maya, melalui *platform* yang dimiliki menjadikannya seseorang idola dalam sebuah kajian keislaman bahkan guru spiritual yang berjalan hingga kini. Eksistensinya tersebut membuktikan bahwa pembubaran eks-HTI tidak memberikan efek signifikan, mereka justru kian leluasa berdakwah di ruang publik melalui media sosial, ini memberikan sinyal bahwa para pengusung *khilafah* masih bergerak untuk terus menjalankan misinya. Terlepas dari fakta bahwa eks-HTI merupakan organisasi minoritas, tersudutkan dan dianggap makar tetapi semangat mereka tetap berkobar dan perlu diwaspadai. Organisasi boleh bubar, tetapi pemikiran makin gencar, itulah yang penulis amati dari beberapa wacana yang berkembang di media sosial. Siklus yang digunakan pun masih sama, yakni berusaha untuk mereduksi sebuah peristiwa dan isu-isu yang berkembang di masyarakat lalu memunculkan sebuah pandangan yang mengarah pada *deligitamasi* terhadap pemerintah dan disambut dengan sebuah wacana bahwa hanya *khilafah* yang mampu membawa negara ini keluar dari *problem* sosial yang ada.

Dalam konten Felix Siauw yang telah disajikan oleh penulis pada bab sebelumnya, penggunaan cara dengan menyerang pemerintah masih konsisten

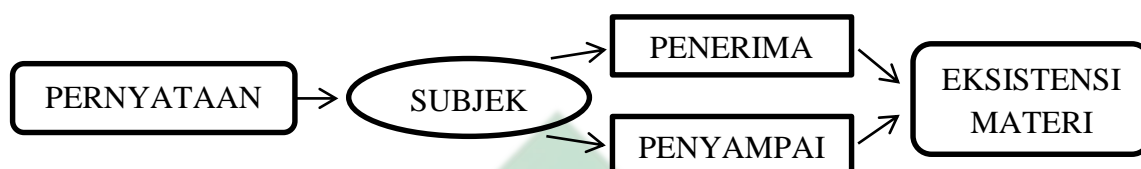
³ Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 35.

dilakukan. Beberapa kebijakan yang dinilai oleh kelompok mereka merugikan umat Islam diserang untuk meyakinkan umat bahwa pemerintah tidak lagi peduli. Felix pun juga menyerang beberapa pemikir dan organisasi Islam yang terkenal dengan melakukan kontra narasi terkait isu-isu keislaman yang berkembang. Pada bab tiga, ada dua hal yang dikritik Felix, dalam hal ini adalah Islam Nusantara yang dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama dan ilmu tasawuf yang dikemukakan Gus Dur. Ini menunjukkan terjadi perang wacana dalam ruang media sosial antara kelompok Islam Tradisional (diwakili NU) dan Islam Puritan (diwakili eks-HTI), dimana kontra yang dilakukan oleh Felix juga menggunakan kajian literatur keislaman yang berujung pada tarik ulur kepercayaan masyarakat mana yang paling Islam. Fenomena tersebut akan mengakibatkan kebingungan bagi kelompok yang sedang mencari identitas keislamannya terutama bagi kelompok usia generasi-Z.

Gerakan Felix bisa kita baca dari cara kerja kekuasaan Michel Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan bersifat menyebar-disiplin-memiliki kohesi sosial.⁴ Dan kekuasaan terjadi dimana-mana tidak terbatas pada ruang pemerintahan saja, bukan konstitusi dan tidak memiliki struktur. Jika orang hanya menggambarkan semua fenomena kekuasaan hanya dari negara ini menumbuhkan pada sesuatu yang represif. Hal ini bukan berarti Foucault menyatakan negara tidak penting, tetapi baginya kekuasaan sebenarnya lebih dari sebuah negara. Dia memberikan dua pemaknaan: pertama, aparat negara jauh dari kemampuan untuk menutupi relasi kekuasaan yang aktual, dan kedua, negara hanya beroperasi pada

⁴ Iswandi Syahputra, "Post Media Literacy ; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Faoucault", *Jurnal Aspikom*, Vol. 1 No. 1, (2010), 3.

diatas dasar sesuatu yang lain yakni dalam relasi-relasi yang telah ada. Tetapi Foucault menginginkan sebuah cara kerja kekuasaan yang memiliki akar dalam seluruh relasinya yang jamak dan tak terbatas.⁵



Gambar: skema proses kuasa/pengetahuan

Skema diatas menunjukkan bagaimana sebuah pengetahuan, wacana, gagasan, dan sebagainya akan terus eksis serta mempengaruhi pikiran individu. Hal ini disebabkan salah satu faktor ada dua subjek yang *istiqomah* menyampaikan apa yang diyakininya (adanya penerima dan penyampai). Selaras dengan hal tersebut, dalam pola dakwahnya Felix membentuk sebuah kekuasaan yang terbangun atas relasi-relasi yang saling terhubung, Felix hampir pasti membalas setiap komentar yang masuk dalam setiap postingannya, tapi tidak semua akan dibalas hanya *followers* yang satu frekuensi dan ini bagian dari tujuan untuk meneruskan eksistensi sebuah gagasan.

Felix juga memiliki hubungan yang erat dengan beberapa publik figur entertainment, antara lain *Podcast* bersama Rafly Harun (2020), Arie Untung (2020), *podcast* Karni Ilyas Club (Juni-2021), Teuku Wisnu dalam *podcast* The Sungkars Family (2018), Baim Wong (2020), dalam Cinta Qur'an TV Ahmad Dhani bersama tiga anaknya (2020) dan TV One yang merupakan stasiun televisi nasional juga beberapa mengundang Felix dan masih banyak lagi.

⁵ Michel Foucault, *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santosa, (Yogyakarta: Narasi, 2017), 157.

Sekilas, nama-nama tersebut merupakan figur terkenal di dunia entertainment, jelas figur tersebut memiliki penggemar dan pengikut juga, dan terdapat stasiun televisi nasional yang tidak bisa dipungkiri wilayah siarannya. Relasi tersebut dimanfaatkan oleh Felix untuk membangun kuasa bersifat menyebar melalui teman yang satu frekuensi dengannya, dalam media sosialnya tingkat interaksinya tinggi, bisa dilihat dari kolom komentar betapa komunikatifnya Felix dengan para penggemarnya. Ini yang kemudian penyebaran paham ideologi minoritas tetap berjalan meskipun tidak pada fase mobilisasi massa. Akan tetapi ini merupakan pembentukan paham tentang *khilafah* yang akan sangat cepat terserap karena kemasifan paham itu dibicarakan di ruang publik dan melibatkan publik figur.

Menurut penulis ada dua alat kerja kekuasaan yang dilakukan oleh Felix dalam menyebarluaskan gagasannya yakni normalisasi dan *disciplinary power*. Foucault menunjukkan bahwa tubuh juga salah satu bagian dari relasi kuasa untuk berjalan, relasi tersebut melatih, menandai, membentuk, menanamkan, dan menguasai tubuh, Foucault menyebut ini *disciplinary power*. Ini terlihat dari bagaimana Felix mengajarkan bahwa setiap umat Islam wajib melaksanakan ibadah, wajib hijab bagi muslimah, mengagungkan kejayaan Islam (terutama Turki Utsmani), dasar hukum Islam hanya Al-Qur'an dan Hadits, tidak berpacaran bagi anak muda, *khilafah* adalah perintah Allah, dan Kontekstualitas pada agama adalah sesat.⁶

⁶ “Menengok Sesat Pikir Felix Siauw Saat Komentari Pernyataan Ibu Sinta Nuriyah” dalam [https://islami.co/Diakses 14 Desember 2021](https://islami.co/Diakses%2014%20Desember%202021).

Proses selanjutnya bahwa sistem kuasa juga akan memerlukan normalisasi, normalisasi adalah instrumen kekuasaan pendisiplinan yang menjadi instrumen penilaian untuk mengukur, mengelompokkan, dan mengkategorikan individu sesuai standar atau norma tertentu. Pada intinya ini adalah sebuah hukuman mengenai ketidaktepatan aktivitas, tingkah laku, waktu, dan wicara.⁷ Saat Felix berdakwah seringkali memberikan normalisasi bagi yang tidak berjuang dalam agendanya sama hanya dengan menzalimi Allah karena tidak menjalankan Islam secara utuh seperti yang diperintahkan, mengkaitkan dengan kata rezim (pemerintah yang dianggap kufur), bahkan akan distigma sebagai pengusung kezaliman bagi umat Islam dan apabila tidak menjalankan apa yang kelompok mereka tentukan maka balasannya adalah neraka. Menurut penulis, itu merupakan stigma yang tidak sepatasnya diucapkan, hanya karena ketidaksamaan cara pandang bukan menjadikan seseorang bebas mengolok-olok individu lain dengan dasar 'kebebasan' dalam negara demokrasi dan hal semacam ini terjadi selalu terjadi.

Seperti yang telah disampaikan Foucault bahwa untuk menjalankan kekuasaan dan mencari simpati kita memerlukan sebuah pengetahuan yang telah direduksi kebenarannya agar sesuai dengan kepentingan yang ada. Pengetahuan bukanlah sebuah mitos yang dipercaya hanya karena cerita hanya atas sebuah *history* yang berkembang di lingkungan sosial tersebut. Dengan menggunakan dalil ayat suci dan keilmiahan memiliki daya tarik yang lebih mampu meyakinkan masyarakat. Ini sangatlah berbahaya, karena segala tindakan atau pandangan yang

⁷ Misbah Mustofa, "Analisis Disiplin dan Kuasa Tubuh Michel Foucault Dalam Kehidupan Pondok Kebun Jambu Al-Islamy Cirebon", *Yaqzhan*, Vol. 3 No. 1, (2017), 168.

didasari pada sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan suku, agama, ras, dan golongan.⁸ Dan perlu dipahami bahwa isu sara merupakan alat yang berpotensi paling tinggi memecah belah masyarakat yang majemuk.

Apakah Felix juga mereduksi pengetahuan? Tentu jawabannya adalah iya, kini penulis akan memberikan beberapa pengetahuan yang direduksi oleh Felix, menurut penulis ini sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa *khilafahisme* Felix masih berkembang.

1. Felix sering menyebut bahwa kepemimpinan yang amanah adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan sistem kepemimpinan yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya pemutus perkara adalah *khilafah*, dan Felix memberikan dalil atas konsep tersebut dari Surah An-Nisa ayat 59. Sedangkan, dalam surah tersebut hanya memberikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam surah itu juga tidak ada secara eksplisit maupun implisit untuk mendirikan negara dengan sistem *khilafah*. Ini karena Islam tidak pernah menentukan apalagi mewajibkan satu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu, justru Islam memberikan kesempatan bagi umatnya untuk merancang dan mengatur sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang terpenting suatu pemerintahan harus bisa melindungi warganya dalam mengamalkan agamanya serta mewujudkan kemakmuran, sedangkan pemerintah dan ulama

⁸ “Sara Adalah Isu Sensitif, Berikut Arti dan Penjelasannya” dalam [https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/Diakses 15 Desember 2021](https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/Diakses%2015%20Desember%202021).

dalam posisi ini adalah *ulil amri* yang harus ditaati dan diikuti segenap masyarakat, sesuai dengan ayat yang disinggung sebelumnya.⁹

2. Felix pernah membuat konten dengan judul “Tuhan Tidak Perlu Dibela” (<https://youtu.be/hGvNsAlPyfU>) di *Youtube* miliknya. Felix salah dalam membuat logika, apalagi itu tentang ruang akidah. Dalam kontennya secara implisit dia menyatakan bahwa pembelaan kepada orang tua itu sama dengan pembelaan kita terhadap Allah, meskipun konteksnya adalah bentuk ekspresi cinta. Tetapi perlu ditegaskan ulang bahwa Allah sebagai Sang Pencipta memiliki sifat wajib, salah satunya adalah *mukhalafahu lilhawadits* (Allah berbeda dengan segala ciptaan-Nya), ini merupakan sifat yang wajib diyakini oleh seorang muslim bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk-Nya dan wajib hukumnya menafikan daripada Allah yang menyerupai-Nya dari segala yang baru.¹⁰ Dalam Al-Qu’an juga dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada sesuatu jua pun dari makhluk yang dapat menyamai-Nya.¹¹ Sedangkan tulisan “Tuhan Tidak Perlu Dibela” yang dimaksud Felix adalah karya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Konsep yang disampaikan Gus Dur mengajak beragama dengan mengedepankan rasa toleransi, tidak merendahkan agama lain, ini tercermin dari artikelnya bahwa “Allah adalah zat yang Maha Besar, artinya seperti apapun penilaian manusia atas Allah, sama sekali tidak mempengaruhi kebesaran dan keangungan-Nya di semesta

⁹ Muhammad Sulton Fatoni, *Catatan Untuk Felix Siauw*, (Bandung: Mizan, 2018), 80.

¹⁰ Pirhat Abbas, “Paham Keagamaan H. Abdul Jalil bin H. Demang: Analisis Kitab *Minhaj al-Umniyah fi Bayani ‘Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah*”, *Kontekstualita*, Vol. 25 No. 1, (2010), 148.

¹¹ Burhanudin Banta Cut, “Tauhid Dalam Konsepsi Abdurrauf”, *Substantia*, Vol. 13 No. 2, (2011), 176.

alam ini.¹² Jadi kesimpulannya adalah Gus Dur berusaha memadukan konsep akidah dan konsep sufisme, usaha ini bukanlah sesuatu yang mengada-ada atau mencoba membuat rumusan baru, tetapi dalam ajaran tasawuf itu tidak terlepas dari pengenalan terhadap Allah.¹³

Dari apa yang telah penulis sajikan diatas, maka sangat jelas bahwa Felix mereduksi sebuah pengetahuan dari kebenaran sebenarnya untuk membuat kekuasaan atas individu yang mencari identitas keislamannya, dan merupakan alat untuk melemahkan pemerintah.

B. Kritik Akademisi Muslim Terhadap *Khilafah* Eks-Hizbut Tahrir Indonesia

Pada dasarnya ide *khilafah* tidak berjalan sesuai dengan mulus, mereka (eks-HTI) banyak mendapatkan kritikan yang berat dari berbagai kalangan intelektual baik dari bidang akademik, pondok pesantren, bahkan para tokoh moderat. Sudut pandang yang bertolak belakang dari pandangan Felix dan organisasinya tersebut ini perlu disajikan guna sebagai bahan pembanding atas perang identitas keislaman. Ini perlu perhatian khusus karena iklim keagamaan yang kian meningkat, tidak hanya banya yang mualaf, tetapi yang sudah Islam pun ingin mendalaminya secara serius. Felix dianggap sebagai inspirator kalangan muda untuk berhijrah, Felix terbilang cepat belajar Islam, secepat kilat dia merasa telah menguasai Islam dan merasa mampu berdebat dengan para cendekiawan

¹² “Review Buku Gus Dur Tuhan Tidak Perlu Dibela” dalam <https://tugujatim.id/Diakses> 22 Oktober 2021.

¹³ Burhanudin Banta Cut, “Tauhid Dalam Konsepsi Abdurrauf”, *Substantia*, Vol. 13 No. 2, (2011), 178.

muslim seperti Ibu Sinta Nuriyah, Gus Muwafiq, dan kyai atau ulama yang sudah jauh lebih berkualitas sebenarnya.

Status Pancasila sebagai falsafah bangsa tidak dapat diganggu gugat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah konsesnsus final adalah fakta. Mencintai tanah air dan membelanya dari hal terburuk sekalipun adalah benar adanya, tetapi negara ini terus-terusan dipaksa membahas *khilafah* dan mengabaikan segala agenda yang lebih *masalahah* untuk memajukan bangsa. Dan jelas ustaz prematur ada dibalik semuanya. Bagaimana tidak seorang yang baru masuk dan mempelajari Islam, melawan para tokoh yang sedari lahir terdidik di lingkungan Islam, membandingkan Felix dengan tokoh ulama Nahdliyyin misalnya, merupakan kebodohan yang nyata, apalagi membandingkan dalam hal konsep bernegara, ini sangat tidak masuk akal. Fenomena ustaz prematur sendiri, muncul sebagai pendatang baru dalam dunia wacana keislaman merasa sudah menguasai Islam secara utuh, bahkan baru mengenal Islam sudah berani menentang konsensus ulama yang berjuang mendirikan negara.¹⁴

Gerakan kebangkitan Islam (*Islamic revivalism*) adalah sebuah gambaran tingginya keinginan umat Islam untuk memperjuangkan Islam yang *kaffah*, yakni ajaran Islam dipraktekkan dalam setiap lini kehidupan yang mencakup sistem nilai dan sistem hukum. Gerakan ini melibatkan kelompok-kelompok Islam militan yang cenderung bermusuhan dengan negara, gerakan revivalisme Islam ini mewakili berbagai corak gerakan yang ada selama ini, diantaranya Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia

¹⁴ “Felix Siauw Nafsu Khilafah dan Fenomena Ustaz Prematur” dalam [https://harakatuna.com/Diakses 15 Desember 2021](https://harakatuna.com/Diakses%2015%20Desember%202021).

(HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Dakwah Salafi. Gerakan ini termasuk pendukung penerapan syariat Islam yang *kaffah* dalam sendi kehidupan bermasyarakat dengan cara mengembalikan teks pada karakter ideologis yang statis, eksklusif, tekstualis, dan ahistoris. Sedangkan kelemahannya adalah produk penafsiran teks yang mengabaikan kontekstualisasi teks, padahal Al-Qur'an haruslah dipahami sesuai dengan konteksnya agar teks dapat berbicara, dengan demikian prinsip Al-Qur'an yang *shalih li kulli zaman wa makan* dapat terbukti.¹⁵

Abdurrahman bin Abdul Karim pernah mengisahkan ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke Yastrib (Madinah) yang pertama dibangun adalah masjid, kemudian beliau membuat fondasi sosial untuk seluruh golongan yang ada di Madinah (bukan hanya kaum Anshor dan Muhajirin). Dibuatlah perjanjian damai yang dikenal dengan "Piagam Madinah", garis besarnya berisi tentang persamaan harkat dan martabat dan bersama-sama mempertahankan Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah memiliki dua sendi. *Pertama*, kemerdekaan beragama yang tidak hanya diakui dan diizinkan tetapi juga harus dipertahankan dan dijamin oleh negara. *Kedua*, didalamnya dirumuskan gagasan tentang tanah air (*nation*) yang memiliki sifat kemanusiaan, toleransi dan persamaan hak.¹⁶ Felix mungkin tidak mempelajari konsep ini, meninjau bagaimana Felix sangat obsesif terhadap konsep kenegaraan yang diajarkan Rasulullah yang diyakininya. Sayangnya, konsep yang dipakai Rasulullah selaras

¹⁵ M. Nurdin Zuhdi, "Kritik Terhadap Pemikiran Gerakan Keagamaan Kaum Revivalisme Islam di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 17 No. 2, (2011), 5.

¹⁶ Mochamad Nur Arifin, *Bung Karno "Menerjemahkan" Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2017), 211.

dengan yang kini menjadi konsensus bangsa Indonesia, bukan *khilafah* ala Felix dan kelompoknya.

Banyak yang gagal paham bahwa kekhalfahan semata-mata merupakan institusi keagamaan, padahal dalam pemerintahan Islam istilah *amir al-mu'minin* (pemimpin kaum beriman), meniscayakan bahwa penguasa memiliki kekuasaan militer yang penuh dan seorang *khilafah* berkewajiban untuk menghilangkan bid'ah, memerangi orang-orang kafir, dan memperluas wilayah *Dar al-Islam* (negeri Islam). seperti yang telah disinggung sebelumnya, Felix sangat mengidamkan masa *kekhalfahan* yang terjadi pada masa Utsmaniyah. Sedangkan yang dapat disebut pemerintahan *kekhalfahan* republik adalah masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang dikenal dengan al-Rasyidin. Sedangkan masa dari Muawwiyah, konsep *kekhalfahan* berubah menjadi sebuah dinasti, dan berlangsung hingga runtuhnya Dinasti Utsmaniyah tahun 1924.¹⁷ Dan ini perlu diwaspadai bagi kaum muda untuk tidak terjebak pada sebuah wacana yang tidak paham secara *history*.

Nasrullah dalam jurnalnya memberikan kritiknya terhadap pandangan eks-HTI terkait argumentasinya yang mengatakan tidak wajib mematuhi perintah pemimpin jika perintahnya tidak ada dalilnya atau melakukan perintah yang tidak diperintahkan Allah SWT,¹⁸ seperti mengibarkan dan hormat kepada bendera merah putih. Dalam tulisannya Nasrullah membantah menggunakan hadits Bukhori yang artinya yakni:

¹⁷ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), 229.

¹⁸ Nasrullah, "Kritik Radikalisme Pemikiran HTI", *Diya' al-Afkar*, Vol. 7 No. 2, (2019), 153.

“Setiap muslim wajib patuh terhadap pemimpin baik perintah yang disukai atau yang tidak disenangi, selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Jika diperintahkan untuk maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya”.

Penggunaan hadits tersebut perlu digunakan sebagai *counter* terhadap pandangan eks-HTI yang memiliki ciri tekstualis yang menonjol dalam memahami sebuah teks. Teks yang mereka gunakan adalah bagian dari legitimasi atas apa yang menjadi tujuan mereka, bahkan teks yang mereka tafsirkan secara pandangan mereka bisa berujung pada perilaku radikal.¹⁹

Ali Abdul Raziq dalam pandangannya menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi seperti nabi sebelumnya yang tidak pernah mengajak umatnya mendirikan sebuah negara atau pemerintahan, karena tujuan utamanya adalah misi kerasulan dan tugas utama Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan *Islam Rahmatan lil Alamin*. Menurut Ali Raziq juga karena dalam nash Al-Qur’an dan arahan Rasulullah tidak secara tegas memerintahkan pembentukan negara, sedangkan nash yang ada hanya memuat prinsip-prinsip umum dan dapat diberlakukan untuk segala bentuk kenegaraan atau urusan lain, kapan, dan dimana saja.²⁰

Menurut Imam Bonjol Juhari dan Riyadzul Malikhah dalam jurnalnya yang berjudul *Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI*, memberikan pandangan bahwa para pendiri bangsa mengakui di dalam Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama, apalagi substansinya sejalan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam pancasila justru

¹⁹ Nasrullah, “Kritik Radikalisme Pemikiran HTI”, *Diya’ al-Afkar*, Vol. 7 No. 2, (2019), 234.

²⁰ Syahrudin Siregar, “Khilafah Islam dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq”, *Juspi*, Vol. 2 No. 1, (2018), 130.

merefleksikan pesan-pesan utama semua agama yang dikenal dengan *maqashid al-syari'ah* yaitu kemaslahatan umum. Negara berideologi Pancasila sebagai institusi yang mengakui keragaman, mengayomi semua kepentingan, melindungi segenap keyakinan, dan tradisi bangsa Indonesia yang kemudian menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan bagi seluruh makhluk-Nya.²¹

Maka dari seluruh rangkaian ini, kita bisa melihat bahwa Felix dan eks-HTI melakukan propaganda kedaulatan di tangan Allah sebagai pengganti kedaulatan di tangan rakyat. Mereka juga mempropagandakan konsep nasionalisme bertentangan dengan *ukhwah islamiyah* serta memvonis nasionalisme sebagai penyebab perpecahan umat Islam. Dalam menjalankan semua itu jelasnya sangat perlu sebuah wacana yang memiliki bobot intelektual, dan ini dilakukan oleh eks-HTI dan Felix yang mengerahkan semua aktivis yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam pertempuran wacana untuk mencapai tujuan politiknya.²² Dan semua itu dijalankan melalui ruang publik yang sangat cepat penyebarannya, ini sangat signifikan pengaruhnya bagi kelompok usia yang berada di lingkaran generasi-Z yang tengah mencari identitas keislamannya dan inspirator hidupnya.

²¹ Imam Bonjol Juhari dan Riyadzul Malikah, "Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI", *Al-Manar*, Vol. 7 No. 1, (2021), 48.

²² Muhammad Sulton Fatoni, *Catatan Untuk Felix Siauw*, (Bandung: Mizan, 2018), 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua permasalahan, data, dan analisis yang telah dipaparkan, berikut beberapa kesimpulan oleh penulis:

Pertama, perkembangan yang pesat bidang teknologi menjadikan media sosial sebagai media dakwah yang sedang *trend* di Indonesia, ini hanya pergeseran cara dakwah bagi simpatisan dan kader eks-HTI. Mereka mengajak publik figur untuk menyebarluaskan *khilafah*, terbukti dari fenomena ustaz baru bermunculan yang turut membahas isu dan wacana keislaman di media sosial. Media sosial menjadi arena pertarungan bebas wacana dan isu keislaman tanpa ada yang membatasi, ini dikarenakan dalam sosial media semua orang bebas menulis, berbicara, mengkritik, dan sebagainya tanpa memandang latarbelakang sosial, politik, pendidikan, dan ilmu yang dimiliki. Menjadi lebih tidak terkendali saat kelompok usia generasi-Z (tidak semuanya) lebih suka belajar tentang segala hal dari sosial media termasuk menentukan identitas keislamannya. Ini menjadikan di Indonesia kini terjadi pergeseran otoritas keagamaan yang lebih suka ustaz viral atau selebritis daripada para kyai-ulama.

Kedua, dalam perspektif Michel Foucault, cara Felix Siauw bisa dilihat dari bangunan kuasa di dunia media sosianyal dengan relasi yang dia miliki. Ini benar-benar menyebar cepat karena relasi Felix Siauw juga memiliki *power* dalam menyampaikan sesuatu di ruang publik, hasilnya dia menjadi salah satu ustaz

yang memiliki kuasa di ruang media sosial. Kekuasaannya dalam media sosial tersebut berlanjut pada tingkatan kuasa, ini menjadikan setiap individu (pengikutnya) mampu dikendalikan oleh Felix Siauw secara utuh, mulai berperilaku, berpakaian, berbicara, hingga sudut pandangnya. Mereduksi pengetahuan sebagai alat politik kekuasaan merupakan salah satu cara Felix Siauw dalam meyakinkan pengguna media sosial tentang *khilafah*, hal ini disebabkan pengetahuan dan suatu ayat/dalil merupakan komponen dasar dalam membangun sebuah kuasa atas individu lain.

Ketiga, mayoritas akademisi memberikan kritik daripada dukungan terhadap *khilafah* ala eks-HTI. Mayoritas menyatakan bahwa *khilafah* yang diusung oleh eks-HTI tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, ini disebabkan Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama bukan berisi tentang urusan politik. Tidak dijelaskannya teknis pemerintahan Islam dalam Al-Qur'an merupakan pesan penting agar manusia dapat membangun negara yang mengutamakan *maqashid al-syari'ah* (kemaslahatan umum). Sedangkan bentuk negara disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap zamannya karena *nash* yang ada hanya memuat prinsip-prinsip umum dan dapat diberlakukan untuk segala bentuk kenegaraan atau urusan lain, kapan, dan dimana saja.

B. Saran

Penelitian ini menggunakan teori Kuasa-pengetahuan Michel Foucault untuk menganalisis *khilafahisme* Felix Siauw di media sosial sebagai ruang

propaganda Islam *ala* eks-HTI. Penelitian ini terbatas pada bangunan pengetahuan cara mereduksi pengetahuan dan kuasa yang terbentuk di dalamnya. Penulis sepenuhnya menyadari masih ada kekurangan dalam pemaparan, penulis berharap ada penelitian yang riset lebih lanjut terhadap banyak aspek dalam propaganda *khilafah* di media sosial.

1. Penulis berharap akan ada penelitian lebih lanjut terhadap propaganda *khilafah* di media sosial dalam sudut pandang yang lain, terutama dalam segi linguistik (bahasa) yang digunakan di media sosial.
2. Penulis berharap ada penelitian lebih lanjut terhadap cara dan pentingnya kontra narasi di ruang media sosial yang efektif bagi kelompok Islam moderat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

Buku

- Akhiyat dan Din Usuluddin. *Negara Utopia Eks Hizbut Tahrir Indonesia*. Surabaya : Imtiyaz, 2019.
- Arifin, Muchamad Nur. *Bung Karno “Menerjemahkan” Al-Qur’an*. Bandung : Mizan, 2017.
- Eriyanto. *Analisis Framing*. Yogyakarta : Lkis, 2002.
- Fatoni, Muhammad Sulton. *Catatan Untuk Felix Siauw*. Bandung : Mizan, 2018.
- Foucault, Michel. *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir Yogyakarta: IRCiSod, 2012.
- Foucault, Michel. *Wacana Kuasa/Pengetahuan*. terj. Yudi Santosa. Yogyakarta : Narasi, 2017.
- Hitti, Philip.K. *History Of The Arabs*. terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Ikhwan, Manirul, dkk. *Literatur Keislaman Generasi Millenial*. Yogyakarta : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.
- Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial. *Kontestasi Wacana Keislaman Di Dunia Maya*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Siauw, Felix Y. *Khilafah Remake*. Jakarta : AlFatih Press, 2014.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018.

Jurnal

- Abbas, Pirhat. “Paham Keagamaan H. Abdul Jalil bin H. Demang : Analisis Kitab *al-Umniyah fi Bayani ‘Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah*. *Kontekstualita*. Vol. 25 No. 1, 2010.
- Adhayanto, Oksep. “Khilafah Dalam Pemerintahan Islam”. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1 No. 1, 2011.

- Adlin, Alfathri. "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, *Parrhesia*". *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*. Vol. 1 No. 1, 2016.
- Al Amin, Ainur Rafiq. "Kritik Pemikiran Hizbut Tahrir Yang Autokratik". *Teosofi*. Vol. 7 No. 2, 2017.
- Arif, Syaiful. "Pandangan dan Perjuangan Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia". *Jurnal Aspirasi*. Vol. 7 No. 1, 2016.
- As'ad, Muhammad. "Penetrasi Dakwah Islamisme Eks HTI di Indonesia : Studi Etnografi Dakwah Felix Siau & "Yuk Ngaji" di Media Sosial". *Jurnal Komunikasi Islam*. Vol. 11 No. 1, 2021.
- Christiani, Lintang Citra dan Prinisia Nurul Ikasari. "Generasi Z dan Pemeliharaan Relasi Antar Generasi Dalam Perspektif Budaya Jawa". *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Vol. 4 No. 2, 2020.
- Cut, Burhanudin Banda. "Tauhid Dalam Konsepsi Abdurrauf". *Substantia*. Vol. 13 No. 2, 2011.
- Farida, Umma. "Islam Pribumi dan Islam Puritan : Ikhtiar Menemukan Wajah Islam Indonesia Berdasar Proses Dialektika Pemeluknya dan Tradisi Lokal". *Jurnal Fikrah*. Vol. 3 No. 1, 2015.
- Hayati, Nilda. "Konsep *Khilafah Islamiyah* Hizbut Tahrir Indonesia Studi *Living al-Qur'an* Perspektif Komunikasi. *Episteme*. Vol. 12 No. 1, 2017.
- Juhari, Imam Bonjol dan Riyadzul Malikhah, "Kontroversi Penafsiran Sistem Politik *Khilafah HTI*", *Al-Manar*, Vol. 7 No. 1, (2021).
- Jauhari, Muhammad Ahsan. "Perilaku Sosial Santri Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Kota Kediri. *Spiritualita*. Vol. 7 No. 1, 2017.
- Karman. "Dominasi Wacana Anti-Politik Barat Pada Media-Muslim Revivalis". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 18 No. 2, 2014.
- Kebung, Konrad. "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di Indonesia. *Jurnal Melintas*. Vol. 33 No. 1, 2017.
- Khatim Muzakka, Ahmad. "Propaganda *Khilafah HTI* di Indonesia". *Jurnal Penelitian*. Vol. 14 No. 2, 2017.
- Khazin, Abdullah. "Konsep Kekuasaan Michel Foucault". *Teosofi*. Vol. 2 No. 1, 2012.

- Latifah, Nor dan Romario. "Trendsetter Muballigh di Medsos: Analisis Framing Instagram Felix Siauw dan Hanan Attaki". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 15 No. 1, 2019.
- Marfiando, Bayu. "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau Dari Kebebasan Berserikat". *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol. 14 No. 2. 2020.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol. 18 No. 1, 2013.
- Muhsin, Ilyya. "Gerakan Penegakan Syariah: Studi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY". *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 12 No. 1, 2012.
- Mulyaden, Asep. "Ideologi Islam Tradisionalis Dalam Tafsir". *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Vol. 1 No. 2, 2021.
- Mustofa, Misbah. "Analisis Disiplin dan Kuasa Tubuh Michel Foucault Dalam Kehidupan Pondok Kebun Jambu Al-Islamy Cirebon". *Yaqzhan*. Vol. 3 No. 1, 2017.
- Nashori, Fuad. "Kekuatan Karakter Santri". *Jurnal Millah*. Vol. 11 No. 1, 2011.
- Nasrullah, "Kritik Radikalisme Pemikiran HTI", *Diya' al-Afkar*, Vol. 7 No. 2, (2019).
- Prasetyo, Bambang. "Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 19 No. 2, 2019.
- Prasasti, Suci dan Erik Teguh Prakoso. "Karakter dan Perilaku Millennial: Peluang Atau Ancaman Bonus Demografi". *Jurnal Consilia*. Vol. 3 No. 1, 2020.
- Qohhar, Abdul dan Kiki Muhamad Hakiki. "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran". *Jurnal Kalam*. Vol. 11 No. 2, 2017.
- Qurniawati, Rina Sari dan Yulfan Arif Nurohman. "eWOM Pada Generasi Z di Sosial Media". *Daya Saing : Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*. Vol. 20 No. 2, 2018.
- Riyadi, Ahmad Ali. "Gerakan Post-Tradisionalisme Islam". *Jurnal Al-Fikra*. Vol. 2 No. 2, 2003.
- Rofiuddin, Muhamad. "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)". *Jurnal Islamuna*. Vol. 2 No. 1, 2015.

- Romario, "Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Ruang Media Sosial Instagram". *Jurnal Aqlam*. Vol. 4 No. 1, 2019.
- Sadari, "Agama dan Negara Menakar Pandangan HTI Tentang Khilafah dan Demokrasi", *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin*. Vol. 1 No. 1.
- Satria, Widi Hardika dan Naldo. "Studi Observasi terhadap Penggunaan *LINE* oleh Generasi Millennial". *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Vol. 1 No. 1, 2018.
- Siregar, Syahrudin. "Khilafah Islam dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq", *Juspi*, Vol. 2 No. 1, (2018).
- Subowo, Adhika Tri. "Membangun Spiritualitas Digital Bagi Generasi Z". *Dunamis : Teologi dan Pendidikan Kristiani*. Vol. 5 No. 2, 2021.
- Suwarno. "Pondok Pesantren Dan Pembentukan Karakter Santri". *Jurnal Ilmiah Kajian Islam*. Vol. 2 No. 1, 2017.
- Syahputra, Iswandi. "Post Media Literacy ; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault". *Jurnal Aspikom*. Vol. 1 No. 1, 2010.
- Wahyuni Purbohastuti, Arum. "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi". *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*. Vol. 12 No. 2.
- Zain, Arifin. "Khilafah Dalam Islam". *Al Idarah*. Vol. 3 No. 1, 2019.
- Zuhdi, M. Nurdin, "Kritik Terhadap Pemikiran Gerakan Keagamaan Kaum Revivalisme Islam di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 17 No. 2, 2011.
- Zulfadli. "Orientasi Politik Aktivistis Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan". *Kontekstualita*. Vol. 33 No. 2, 2018.
- Zunaih, Ahmad Iwan. "Khilafah : Sistem Pemerintahan Yang Profan". *Jurnal Ummul Quro*. Vol. 4 No. 2, 2014.

Website

- 14 Macam Media Sosial Yang Sering Digunakan, Beserta Penjelasan. Dalam [https://m.liputan6.com/hot/read/4645781/Diakses 13 Oktober 2021](https://m.liputan6.com/hot/read/4645781/Diakses%2013%20Oktober%202021).
- Felix Siau Nafsu Khilafah dan Fenomena Ustaz Prematur. Dalam [https://harakatuna.com/Diakses 15 Desember 2021](https://harakatuna.com/Diakses%2015%20Desember%202021).

Inilah Negara Pengguna Instagram Terbanyak, Indonesia Urutan Berapa?. Dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/03/Diakses> 13 Oktober 2021.

Mantap Hampir Seluruh Netizen Indonesia Pengguna Youtube. Dalam <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/07/05/Diakses> 13 Oktober 2021.

Menengok Sesat Pikir Felix Siauw Saat Komentari Pernyataan Ibu Sinta Nuriyah. Dalam <https://islami.co/Diakses> 14 Desember 2021.

Pilkada DKI Jakarta Berujung Pemberangusan HTI dalam <https://tirto.id/Diakses> 29 Juni 2022.

Riview Buku Gus Dur Tuhan Tidak Perlu Dibela. Dalam <https://tugujatim.id/Diakses> 22 Oktober 2021.

Sara Adalah Isu Sensitif, Berikut Arti Dan Penjelasannya. Dalam <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/Diakses> 15 Desember 2021.

Siapa Tokoh Terpopuler Di Twitter Pada 2021?. Dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/09/Diakses> 13 Oktober 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A